

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Bappebti Tingkatkan
Pengawasan Praktik Illegal

Kontrak Berjangka
Berbasis Industri Hilir



JFX Gebrak
Ekonomi Syariah

100%
INDONESIA 



DARI REDAKSI

Jakarta. Future Exchange (JFX) mencoba 'mengembangkan sayap' diversifikasi produk perdagangan komoditi syariah. Kurang dari satu tahun sejak dilaksanakan MoU antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan JFX, pada 20 Desember 2010, JFX telah meluncurkan perdagangan perdana komoditi syariah pada 13 Oktober 2011.

Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan, masih sempat menyaksikan peluncuran perdagangan komoditi syariah JFX. Karena beberapa hari setelah itu, 19 Oktober 2011, Mari Pangestu digeser Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Meneg PPN dan Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, mewakili Menko Per-ekonomian, Hatta Radjasa, juga turut sebagai saksi peresmian perdagangan perdana komoditi syariah JFX.

Gebrakan JFX memasuki ranah ekonomi Syariah Islam, ini, tentunya ujian dan tantangan bagi perkembangan perdagangan komoditi primer di Indonesia, serta industri perbankan syariah nasional. Pasalnya, JFX harus bisa membuktikan konsep perdagangan komoditi itu memenuhi kaidah dan norma-norma syariah. Apa lagi sasaran dari perdagangan komoditi syariah itu merupakan industri perbankan syariah yang saat ini kekurangan instrumen keuangan.

Harapan produk JFX ini bisa diterima pasar memang sangat terbuka lebar. Mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Namun, sebagai mana diingatkan Ketua MUI, K.H Ma'aruf Amin, perdagangan itu harus riil, ada barangnya dan harus ada serah terima barang. Jika hanya berdagang kertas tentu tidak memenuhi kaidah syariah Islam. "Kalau tidak memenuhi syariah Islam, dalam jangka panjang perdagangan itu akan ditinggalkan orang."

Mahendra Siregar, dalam wawancara khusus dengan **Buletin Kontrak Berjangka**, secara gamblang menyampaikan pesan, bahwa bursa berjangka di dalam mengembangkan kontrak berjangka komoditi haruslah komoditi yang berbasis industri hilir. "Tidak usah muluk-muluk dengan kontrak berjangka yang mungkin belum ada di bursa berjangka luar negeri. Kembangkan saja kontrak berjangka komoditi dari dalam negeri. Tetapi harus mengakar pada industri hilir dan dikonsumsi masyarakat."

Lebih jauh dikatakan Mahendra Siregar, bursa harus berpikir inovatif, mengapa tidak memunculkan kontrak berjangka komoditi berdasarkan sentra produksi? Misalnya, mengembangkan kontrak berjangka komoditi kopi Sidikalang, kakao Makassar, lada Muntok. Seluruh dunia kenal dan mengkonsumsi komoditi yang berasal dari Sidikalang dan Makassar, dan Muntok, itu.

"Jadi lebih baik kita berpikir mengembangkan kontrak berjangka komoditi yang mengakar di masyarakat. Dan itu sejalan dengan prinsip kita, 100 % Cinta Indonesia dan Aku Cinta Produk Indonesia," kata Mahendra.

Bagian lain yang menjadi laporan penting pada edisi Oktober 2011, ini, adalah pentingnya otoritas perdagangan berjangka meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal. Upaya pengawasan dan tindakan tegas otoritas perdagangan berjangka itu, harus dilakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian.

Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memblokir setiap informasi dan promosi fores dan indeks di berbagai situs dunia maya yang tidak memiliki izin dari Bappebi. Di samping itu juga, memblokir transaksi perdagangan berjangka tidak berizin yang dilakukan ke berbagai negara melalui teknologi informasi.

Selengkapnya berbagai sajian informasi tersebut silahkan anda baca di buletin kesayangan kita ini.

Salam!



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli Wakil Pemimpin Redaksi: Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni Sirkulasi: Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebi Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebi.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: bulletin@bappebi.go.id

DAFTAR ISI



12-13 *Interview*

Mahendra Siregar
Kontrak Berjangka
Berbasis Industri Hilir



20-21 *Komoditi*

Minyak Astiri Bangle Makin Kesohor



28 *Kiprah*

Wilyana Saudjana
Jadi Agen Perubahan



Info Utama.....4-7

- JFX Gebrak Ekonomi Syariah
- JFX'S Target Transaksi Rp 50 miliar per hari
- Gita Wirjawan dan Bayu Krisnamurthi Pas Bagi Industri PBK dan SRG

Berjangka8-10

- Bappebti Tingkatkan Pengawasan Praktik Ilegal
- Indonesia Menuju Pasar Berjangka Terbesar

Pasar Lelang.....11

- Transaksi PLKA Salut Capai Rp 13,4 miliar

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Resi Gudang Sebagai Bukti Daya Serap Komoditi Lokal
- Kepercayaan Terhadap CPOTR Makin Tinggi
- Desember 2011 BKDI Luncurkan Kontrak Solar
- PP-PBK Wajibkan Daftar Ulang Pelaku SPA

Analisa.....18

Info Harga.....19

Breaknews.....22-23

- Regional rubber market will be established soon
- Indonesian commodity & derivative exchange as basic of Indonesian crude palm oil (CPO) customs exit
- MPOA member explores Indonesian Commodity & Derivative Exchange member
- August non-oil export value is the highest in the history

Wawasan.....24-25

- Pembentukan Pasar Karet Regional

Kolom.....26-27

- Demutualisasi Pergeseran Orientasi Bursa

JFX memasuki ranah ekonomi syariah, dengan mengeluarkan produk perdagangan komoditi dengan prinsip syariah. Sejumlah harapan tentunya dialamatkan kepada JFX, agar dapat menge-lola instrumen ini sesuai dengan Syariah Islam.



JFX Gebrak Ekonomi Syariah

Jakarta Futures Exchange (JFX) meluncurkan perdagangan komoditi syariah yang pertama di Indonesia, pada 13 Oktober 2011, di Hotel Kempinski, Jakarta. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Meneg PPN dan Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, juga hadir dan membacakan sambutan mewakili Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, dalam peresmian perdagangan perdana komoditi syariah JFX.

Perdagangan perdana komoditi syariah JFX juga dihadiri Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syaruh R. Sempurnajaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Ma'aruf Amin, Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mulya E. Siregar, direksi perbankan syariah, sejumlah Duta Besar negara sahabat, pelaku komoditi dan pelaku perdagangan berjangka komoditi.

Mari Elka Pangestu dalam sambutannya mengatakan, peluncuran komoditi syariah JFX ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Sekaligus memanfaatkan instrument pengelolaan likuiditas perbankan syariah melalui transaksi komoditi yang sesuai dengan kaidah sya-

riah. "Kebutuhan produk komoditi syariah dirasakan semakin mendesak terutama bagi kalangan perbankan syariah, sebagai alternatif instrumen financial berbasis syariah. Hal itu pun mengingat kebutuhan transaksi akan produk komoditi berbasis syariah sangat diharapkan oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia."

"Seiring dengan perkembangan bank syariah yang semakin pesat di Indonesia, maka diperlukan beragam underlying transaction berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya adalah melalui mekanisme perdagangan komoditi berbasis syariah," jelas Mari Pangestu.

Lebih juah dikatakannya, dengan semakin bergeraknya perbankan syariah dan produsen komoditi, pada gilirannya sektor riil juga akan semakin berkembang, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Indonesia, dengan potensi pasar syariah terbesar di dunia dan potensi komoditi yang terkemuka di dunia harus bisa memanfaatkan keunggulan ini demi peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Keberadaan produk JFX ini, membuat kita bisa merealisasikan potensi tersebut dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri

sehingga kita semakin tahan menghadapi krisis ekonomi global," kata Mari Pangestu.

Sementara itu, Dirut JFX, Made Soekarwo, mengatakan, perdagangan perdana komoditi syariah JFX ini merupakan kerjasama dan atas dukungan dari Dewan Syariah Nasional-MUI. "Perdagangan komoditi syariah JFX ini awalnya merupakan gagasan dari DSN MUI. Tujuannya salah satu meningkatkan likuiditas perbankan syariah nasional."

"Oleh karena itu, dalam tahap awal perdagangan komoditi syariah ini mengambil segmen perbankan syariah. Kemudian jika perdagangan komoditi syariah ini berjalan baik, tidak tertutup kemungkin-





nan dikembangkan bagi pelaku komoditi ritel," papar Made.

Menurut Made, perdagangan komoditi syariah di JFX memiliki landasan hukum yang kuat setelah DSN MUI, mengeluarkan Fatwa No. 82 tentang perdagangan komoditi dengan prinsip syariah, UU No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi yang diikuti berbagai peraturan dari Bappebti. Serta, diikuti Peraturan Bank Indonesia Syariah. "Oleh karena ketentuan Fatwa No.82, itu, perdagangan komoditi syariah di JFX akan diselenggarakan unit tersendiri. Yakni, JFX Syariah."

"Dalam pelaksanaannya, pengawasan perdagangan komoditi syariah yang di-

selenggarakan JFX Syariah, akan diawasi oleh DSN, Bappabti dan BI Syariah. Dengan demikian, diharapkan perdagangan komoditi syariah pertama di Indonesia ini dapat berkontribusi bagi perkembangan industri syariah dan perekonomian nasional umumnya," tandas Made Soekarwo.

DSN MUI yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa perdagangan komoditi syariah telah bekerja keras merumuskan dan menetapkan fatwa. Pada 5 Agustus 2011, lalu, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 82, tentang perdagangan komoditi dengan prinsip syariah.

"Dari pengalaman kami, fatwa perdagangan komoditi syariah ini merupakan fatwa kedua terpanjang setelah fatwa perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia," demikian seloroh Ketua MUI, Ma'arif Amin.

"MUI mengharapkan perdagangan komoditi syariah ini menambah instrumen syariah di Indonesia. Sehingga terjadi akselerasi likuiditas untuk menempatkan dana atau pun melakukan pembiayaan," jelas Ma'arif.

"Perlu diingat, fatwa No. 82 itu tidak untuk menghalalkan perdagangan di bursa. Tetapi juga tidak mengharamkan apa yang sudah diperdagangkan bursa berjangka. Berdasarkan fatwa itu, perdagangan komoditi yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan syariah adalah harus ada barang yang diperdagangkan. Bukan fiktif atau surat," kata Ma'ruf.

"Berdasarkan kesepakatan, JFX dengan DSN-MUI mengembangkan mekanisme jual-beli komoditi berbasis syariah Islam dengan menggunakan akad-akad sesuai syariah yang diselenggarakan di JFX. Karena itu tidak diberi nama murabahah komoditi sebagaimana wacana awal," imbuhnya.

Menurut Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E Siregar, perda-

gang komoditi syariah yang selenggarakan JFX merupakan sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Proses pengembangan komoditi syariah merupakan kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Sesuai dengan naturenya, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan otoritas fatwa yakni MUI, otoritas keuangan, pelaku pasar dan industri pengguna.

"Berdasarkan pengalaman BI Syariah, dalam mengembangkan produk syariah yang efisien, sesuai dengan kbutuhan industri, dan norma-norma, kaidah syariah merupakan pekerjaan yang membutuhkan konsep yang rinci, dan menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan," kata Mulya.

Kesulitan pertama yang harus dihadapi adalah harus praktis, membutuhkan penafsiran yang arif dalam konteks kekinian, sehingga dapat diikuti berbagai pelaku pasar, tambah Mulya.

"BI Syariah dalam mengembangkan ekonomi syariah telah menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas. Yakni, mengembangkan produk syariah yang mengakar dan memiliki keunikan norma syariah," ujar Mulya.

Lebih jauh diutarakan Mulya, dari sebuah survey islamic financial country indeks tahun 2011, yang dilakukan sebuah lembaga konsultan terkemuka di London, diketahui Indonesia menempati urutan ke empat di bawah Irak, Malaysia dan Uni Emirat Arab, dalam pengembangan ekonomi syariah. Survey indeks ini menggunakan parameter yang cukup ketat. Seperti, berkembangnya lembaga-lembaga syariah, besarnya likuiditas, berkembangnya budaya syariah di tengah masyarakat.

"Kita harapkan dengan adanya keberadaan perdagangan komoditi syariah di JFX pada tahun depan kita menempati peringkat ke dua atau ketiga," harapan Mulya Siregar. ▲

Kronologi perdagangan komoditi syariah JFX'S

20 Desember 2010
MOU antara JFX dengan DSN MUI, yang disaksikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Kepala Bappebti.

9 Februari 2011
Penandatangan Kerjasama antara DSN dengan JFX. - Dalam kerjasama itu, pihak DSN akan menempatkan sebanyak 7 personil sebagai tim pendamping. - JFX memperdagangkan komoditi dengan prinsip syariah.

5 Agustus 2011
MUI menerbitkan fatwa No. 82, tentang perdagangan komoditi dengan prinsip syariah.

8 Agustus 2011
Sosialisasi Fatwa No. 82, diselenggarakan JFX di Jakarta.

13 Oktober 2011
Peluncuran perdagangan komoditi syariah JFX.



Dirut JFX, Made Soekarwo, Ketua MUI KH. Ma'aruf Amin, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar, menyampaikan harapan pada sambutan peluncuran perdagangan komoditi syariah JFX.



JFX Target Transaksi Rp 50 Miliar per hari

Perdagangan komoditi syariah yang diselenggarakan Jakarta Futures Exchange Syariah (JFX), ditargetkan dalam tiga bulan pertama sebesar Rp 50 miliar per hari. Target transaksi harian itu ditetapkan atas dukungan sebanyak 11 perbankan syariah nasional.

"Untuk tahap awal di tiga bulan pertama, transaksi JFX diharapkan mencapai Rp 50 miliar per hari," ujar Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, dalam keterangannya kepada wartawan disela-sela peluncuran perdana komoditi syariah JFX, 13 Oktober 2011.

Dalam penjelasannya, komoditas yang akan diperdagangkan dalam mekanisme syariah ini antara lain komoditi kakao, kopi, dan kacang mete. Sementara itu, tiga produk lain yakni minyak kelapa sawit, olein, dan batubara masih dalam proses kerjasama.

Menurut Bihar, JFX telah menyiapkan sistem transaksi dalam komoditas syariah secara elektronik. Dengan sistem baru ini, para pelaku pasar baik perbankan syariah maupun penjual komoditas harus melakukan proses registrasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Komoditas syariah di JFX berbeda dengan komoditas syariah di Malaysia dari sisi akad transaksi. Di Malaysia hanya menggunakan dua akad, sementara

produk komoditas syariah JFX memiliki lima akad," papar Bihar.

Lebih jauh diutarakan Bihar Sakti Wobowo, akad transaksi komoditi syariah JFX, masing-masing, pertama, akad bai' al musawamah, di mana terjadi transaksi jual beli antara bank dengan penjual komoditas secara tunai, karena penjual tidak memiliki kewajiban menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

Akad kedua adalah murabahah atau jual beli antara sesama bank syariah. Bila bank syariah ingin menjual lagi komoditas ke bursa yang merupakan wakil dari peserta pedagang komoditas, maka muncul lagi akad bai' al musawamah yang menjadi akad ketiga.

Lalu, akad keempat, bai' al muqayyadah atau barter antara bursa dan pedagang komoditas. Dari seluruh rangkaian itu muncul pula akad kelima, yaitu wakalah atau penyerahan kekuasaan.

"Bagi hasil yang ditentukan bagi bank syariah dengan nasabah, ter-

gantung dari masing-masing internal perjanjian bank syariah dengan nasabah yang bersangkutan," tandas Bihar.

Direktur Compliance dan Risk Management, Bank Muamalat, Andi Buchari, menyambut baik komoditi syariah JFX'S. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan sebagai instrumen jika sedang mengalami kelebihan likuiditas.

"Kami yang mengusulkan konsep itu ke DSN, karena di Malaysia produk sejenis itu sudah lama ada," jelas Buchari.

"Dengan adanya instrumen ini, kita bisa investasikan dana yang menganggur untuk sementara waktu. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi ini. Nilai komoditi syariah itu harus lebih besar. Dan, harganya dipasaran tidak terlalu bergejolak," tandas Andi Buchari. ▲



Pas Bagi Industri PBK & SRG

Gita Wirjawan dan Bayu Krisnamurthi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 19 Oktober 2011, di Istana Negara melantik Gita Irawan Wirjawan, selaku Menteri Perdagangan, menggantikan Mari Elka Pangestu, yang dipindah tugas menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Presiden SBY juga melantik Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menggantikan Mahendra Siregar yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Perdagangan itu, diharapkan membawa harapan baru bagi perekonomian nasional khususnya sektor perdagangan. Harapan itu datang dari masyarakat dan kalangan dunia usaha, dengan melihat latar belakang dua pimpinan Kementerian Perdagangan ini.

Bahkan, Mari Elka Pangestu, dalam sambutannya saat serah terima jabatan, mengatakan harapan yang sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

"Saya cukup percaya dengan Pak Gita dan Pak Bayu di dalam memimpin Kementerian Perdagangan, ini. Karena secara fisik Pak Gita dan Pak Bayu, tinggi dan besar. Sehingga langkah mereka bisa lebih cepat menjalankan berbagai kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, berbasis pasar domestik," demikian seloroh Mari Pangestu.

Menjawab harapan masyarakat dan kalangan dunia usaha itu, sesaat setelah serah terima jabatan dengan Mari Elka Pangestu, kepada wartawan di Kementerian Perdagangan Gita Wirjawan, menyampaikan tiga agenda untuk memperkuat perekonomian nasional.

Agenda pertama yang sampaikan penghobby musik jazz dan olah raga golf, ini, yakni, memaksimalkan dan meningkatkan pasar domestik atau perdagangan antarpulau dan daerah. Kedua, menjaga laju perdagangan ekspor di tengah gonjang-ganjing perekonomian global.

"Menjaga laju ekspor dengan tetap memperhatikan kualitas, dan bukan hanya menge-

jar kuantitas," kata pria kelahiran Jakarta, 21 September 1965, ini.

Agenda ketiga, memperhatikan keseimbangan neraca perdagangan, baik ekspor maupun impor. "Namun, dari kesemuanya itu, yang menjadi prioritas meningkatkan dan memperkuat perdagangan domestik," tandas alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, tahun 1992 dan S-2 jurusan administrasi publik dari Harvard University, Amerika Serikat, tahun 2000.

Terkait dengan pasangan baru Kementerian Perdagangan, itu, Buletin Kontrak Berjangka menghimpun sejumlah tanggapan dari pelaku industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

Menurut Dirut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Megain Widjaja, mengatakan, Gita Wirjawan dengan background sektor keuangan akan memberikan arahan dan pemikiran yang bersifat inovatif agar bursa berjangka di Indonesia dapat semakin bersaing dengan bursa-bursa regional. "Saya cukup optimis dengan Menteri Perdagangan, karena beliau cukup memiliki jaringan dan pe-ngaruh di pasar keuangan global."

Selain itu kami juga mengharapkan dengan kepemimpinan Gita Wirjawan, kerjasama inter kementerian, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM niscaya akan menjadi semakin lancar. Sehingga beberapa kebijakan maupun insentif, seperti pajak PPh final derivatif dapat segera dirampungkan.

"Sedangkan dari sisi Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, akan banyak membantu untuk mengembangkan kontrak berjangka berbasis komoditi seperti crude palm oil (CPO),

kopi, kakao, lada dan lainnya. Karena background dan kedekatan beliau dengan dengan asosiasi dan produsen komoditi primer. Sehingga sosialisasi dan pendekatan niscaya akan menjadi lebih mudah," harapan Megain Widjaja.

Dari kalangan perusahaan pialang, Dirut PT Jalatama Futures, Adrian Zangi, mengatakan, "kayaknya pasangan ini merupakan pasangan yang pas, untuk pengembangan industri perdagangan berjangka di tanah air."

"Satu sisi Pak Gita sudah mengetahui seluk beluk industri keuangan global. Dan, Pak Bayu merupakan akademisi yang memahami keunggulan dan permasalahan sektor riil Indonesia. Sehingga, pasangan ini pas bagi perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Kita harapakan dalam waktu yang singkat mereka bisa memberi gebrakan pada industri perdagangan berjangka di Indonesia," terang Adrian Zangi.

Sementara itu, Dirut PT Kuning Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmojo, mengatakan, "saya percaya bahwa beliau berdua adalah pilihan presiden di antara putra bangsa yang terbaik di Indonesia. Diharapkan dengan kepemimpinan mereka mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan rakyat kita pada khususnya."

"Pemahaman beliau mengenai perlunya lindung nilai dan referensi harga, diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan kelompok tani, koperasi, UMKM di sektor riil agro dan tambang, akan mempercepat usaha pengentasan kemiskinan, pertumbuhan lapangan kerja, sesuai dengan kebutuhan bangsa kita di tengah ancaman krisis ekonomi yang melanda kawasan Eropa dan Amerika," tandas Surdiyanto Suryodarmojo. ▲

Bappebti Tingkatkan Pengawasan Praktik Ilegal

Bappebti memiliki kewenangan penuh dalam menindak setiap praktik ilegal. Untuk itu Bappebti akan kerjasama dengan Kemeninfo, memblokir situs-situs yang memperdagangkan forex, logam mulia dan indeks asing. Selain itu bekerjasama dengan Kepolisian untuk menindak praktik-praktik ilegal.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan amanat Undang-undang No.32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi dan Undang-undang No.10/2011, tentang perubahan undang-undang perdagangan berjangka komoditi, akan mendindak setiap pihak penyelenggara perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas perdagangan berjangka. Tindakan tegas juga akan dilakukan kepada pihak-pihak yang melakukan bentuk seminar, training atau bentuk lainnya yang tidak mendapatkan izin dari Bappebti.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aktivitas yang tidak mendapatkan izin dari Bappebti tersebut, Bappebti akan meningkatkan koordinasi dengan semua jajaran penegak hukum baik di Ibukota maupun di daerah. Selain itu, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibentukan Bappebti akan diperkuat sehingga memiliki kemampuan setara penegak hukum lainnya.

Jangka panjang Bappebti juga akan menertibkan penyelenggaraan perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin di wilayah NKRI dengan menggunakan

teknologi informasi. Langkah ini akan dilakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan memblokir semua akses perdagangan berjangka yang tidak berizin.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, kepada Buletin Kontrak Berjangka, baru-baru ini terkait maraknya praktik perdagangan berjangka ilegal dan bentuk edukasi perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

"Undang-undang perdagangan berjangka yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 10/2011, memberi kewenangan yang luas kepada Bappebti untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan dari bentuk perdagangan berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan," jelas Syahrul.

Berbagai penindakan itu memang tidak bisa dilakukan Bappebti semata. Karena SDM yang ada masih kurang memadai baik dari sisi kemampuan penyidikan maupun kuantitasnya. PPNS Bappebti hanya beberapa orang, sedangkan luas wilayah Indonesia yang harus diawasi demikian luas. Untuk me-

ngawasi praktik-praktik ilegal di wilayah ibukota saja, Bappebti sudah kekurangan personil.

"Oleh karena itu, nantinya kami akan meminta bantuan dari Kepolisian. Baik dalam bentuk pelatihan penyidikan maupun dukungan penindakan dari praktik perdagangan berjangka ilegal. Terkait dengan praktik-praktik ilegal, Bappebti pun akan membekali aparat Kepolisian sehingga mereka mampu mencegah dan menindaknya. Karena hanya Kepolisian aparat penegak hukum yang memiliki personil hingga tingkat desa," papar Syahrul.

Tahun 2012, nanti, tambah Syahrul, Bappebti akan rencanakan pertemuan dengan Bareskrim di tingkat pusat dan secara bertahap ditindaklanjuti kerjasama hingga ke tingkat Polres.



"Kerjasama dengan Kepolisian itu berjalan dengan baik, maka situlah Bappebi berhasil mengawasi praktik-praktik ilegal perdagangan berjangka," kata Syahrul.

Blokir

Langkah lain Bappebi yang lebih strategis dalam mencegah berkembangnya transaksi perdagangan berjangka komoditi melalui perdagangan teknologi informasi, adalah kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Upaya kerjasama ini untuk memblokir transaksi perdagangan berjangka yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Tindakan ini juga dikaitkan dengan Undang-undang No. 11/2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Saat ini diberbagai situs yang dapat diakses melalui teknologi informasi, sangat banyak ditemukan berbagai promosi perdagangan forex dan indeks. Jika kita mengacu pada Undang-undang No. 10/2011, tentunya kegiatan itu ilegal. Oleh karenanya harus ditindak," tegas Syahrul.

Untuk menindak berbagai promosi dan transaksi perdagangan forex, logam mulia dan indeks asing itu, harus dilakukan kerjasama dengan Kemeninfo, kita usahakan tahun 2012 sudah bisa dilaksanakan kerjasama itu tambah Syahrul. "Upaya tindak ini sama halnya dengan diblokirnya situs-situs yang menyuguhkan pornografi melalui teknologi informasi."

"Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs seperti itu adalah Kemeninfo, dan tentunya atas usulan kita," katanya.

"Saat ini juga 'kan banyak ditemukan diberbagai tempat, seperti di hotel dan gedung-gedung di kota-kota besar berkedok edukasi perdagangan berjangka. Melalui edukasi itu, masyarakat umumnya dijanjikan keuntungan besar dari transaksi forex dan indeks. Pada hal semua yang dijanjikan itu tidak benar, ujung-ujungnya itu penipuan," ungkap Syahrul.

Kishore di Grebek

PowerUp Capital salah satu perusahaan pialang asal Singapura yang melakukan edukasi perdagangan berjangka untuk kontrak forex dan indeks, pada 8 oktober 2011, di Hotel Citraland, Jakarta, dihentikan kegiatannya karena tidak memiliki izin dari Bappebi. Dalam melakukan tindakan penghentian kegiatan itu, Bappebi bekerjasama dengan Polres Jakarta Barat.

Penggrebekan edukasi perdagangan berjangka yang bersifat gratis itu, dipimpin langsung Kepala Biro Hukum Bappebi, Alfons Samosir dengan dibantu sebanyak empat personil PPNS dari Bappebi. Sedangkan dari Kepolisian, menurunkan dua personil yang dipimpin KanitReskrim Polres Jakarta Barat, Sukidi.

Menurut Alfons Samosir, acara edukasi perdagangan forex itu seharusnya dilakukan setelah mendapat izin Bappebi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 10/2011, tentang Perubahan atas UU No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

"Setiap bentuk edukasi perdagangan berjangka dan penawaran bertransaksi harus melalui izin Bappebi. Jika tidak mendapatkan izin maka dikatakan ilegal," ujar Alfons di sela-sela aksi penggerebekan itu.

Alfons menjelaskan aksi inspeksi mendadak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi perdagangan forex seperti yang selama ini sering terjadi. "Setiap pihak yang ingin mengadakan pelatihan harus mendapat izin agar lembaga pengawas dapat mengontrol kegiatan perdagangan sesuai peraturan yang berlaku."

"Sebagai aparatur negara, Bappebi dapat bertindak dengan dua cara dalam menegakkan peraturan. Yakni, tindakan bersifat prefentif dan represif. Tindakan

yang dilakukan saat ini adalah tindakan represif, sehingga ada efek jera dari kegiatan yang dilakukan secara ilegal," jelas Alfons, kepada para peserta yang juga disaksikan sejumlah wartawan media cetak nasional.

Dari peristiwa pengrebekan itu, para peserta yang hadir berkisar 50 orang tak menerima kehadiran Bappebi di tengah proses edukasi berlangsung. Para peserta mengeluhkan bahwa tak ada peringatan sebelumnya terkait pelarangan edukasi forex dan indeks.

"Sebelumnya kenapa tidak dicegah ketika sudah ada iklan di media cetak. Kenapa sekarang sudah diselenggarakan baru didatangi dan distop seenaknya," ujar Arman salah satu peserta.

Selain itu, masih menurut Arman, "kami lebih percaya dengan pialang asing dibandingkan pialang lokal. Saya sudah ada sebanyak empat kali bertransaksi dengan pialang lokal, dan semuanya saya ditipu. Sedangkan dengan PowerUp ini, setiap investor yang bertransaksi merugi dijamin diganti 1.000 % diganti nilai investasinya. Itu yang membuat kami tertarik mengikuti edukasi ini."

Edukasi PowerUp Capital yang dipimpin Kishore M itu diselenggarakan atas kerjasama dengan event organizer lokal, PT Vicniks International. Tejbhan Lakhiani, Direktur PT Vicniks International, mengakui pihaknya melakukan kekeliruan tidak meminta izin dari Bappebi. Selain itu, dia pun mengakui belum mengetahui jika Bappebi memiliki kewenangan penuh untuk menindak acara tersebut berdasarkan undang-undang perdagangan berjangka komoditi. ▲

Diselenggarakan oleh :

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Grand Angkasa Hotel Medan, 11 Oktober 2011



Indonesia Menuju Pasar Berjangka Terbesar

Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pembentukan harga (price discovery), lindung nilai (hedging), belum dapat terbentuk di dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Transaksi para pelaku pasar perdagangan berjangka didominasi perdagangan di luar bursa (Over The Counter- OTC) atau lebih dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Volume transaksi para pelaku pasar terhadap kontrak berjangka komoditi berbasis komoditi primer hanya sekitar 1 %, selebihnya pada transaksi SPA.

Melihat kondisi tersebut, DPR RI khususnya Komisi VI DPR, berinisiatif melakukan perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, menjadi Undang-Undang No. 10/2011, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kepala Bappebi, Syahrul R. Sempurnajaya, mengutarakan, dengan disyahkannya perubahan undang-undang perdagangan berjangka itu, maka Bappebi berkehilangan mensosialisasikannya. Salah satu bentuk sosialisasi perubahan undang-undang itu, yakni menyelenggarakan seminar perdagangan berjangka komoditi di tiga kota besar Indonesia. Masing-masing di Kota Medan, Sumut, pada 11 Oktober 2011 dan di Kota Makassar, Sulsel, 26 Oktober 2011. Dan menyusul di Kota Surabaya, Jatim.

"Dipilihnya tiga kota besar itu karena Kota Medan, Makassar dan Surabaya, merupakan sentra sejumlah komoditi unggulan yang memiliki potensi ekspor. Di samping itu, ketiga kota besar tersebut berpotensi dikembangkan instrumen

perdagangan berjangka komoditi," jelas Syahrul R Sempurnajaya.

Peserta seminar perdagangan berjangka komoditi itu dihadiri pelaku dan asosiasi komoditi, pelaku perdagangan berjangka komoditi, pejabat instansi terkait, aparat penegak hukum, perbankan, dan akademisi. Sedangkan narasumber yang mengisi seminar tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno, Anggota Komite Perdagangan Berjangka, Bustanul Arifin, Direksi BKDI dan Direksi ISI, Pialang CIMB Malaysia, G.M Teoh, Direksi JFX, Direksi KBI dan pejabat Bappebi.

Lebih jauh dikatakan Syahrul, hal-hal penting dari perubahan undang-undang tersebut, antara lain definisi komoditi yang dapat diperdagangkan bursa semakin diperluas, bukan saja komoditi primer berbasis perkebunan, pertambangan tetapi juga komoditi intangible seperti komoditi suku bunga, carbon, cuaca dan lainnya.

"Dalam menentukan kontrak berjangka yang akan diperdagangkan bursa pun tidak lagi melalui keputusan presiden. Melainkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebi," tandas Syahrul R. Sempurnajaya.

Bergeser

Perdagangan berjangka komoditi Indonesia di bursa berjangka dalam waktu lima tahun ke depan diperkirakan semakin tinggi. Hal itu antara lain disebabkan adanya pergeseran pola pikir pelaku pasar yang tidak hanya memperdagangkan kontrak. Melainkan juga para pelaku pasar itu memiliki keinginan bertransaksi fisik komoditi.

"Krisis keuangan yang melanda beberapa kawasan pada tahun 2008 lalu, lebih disebabkan ulah para spekulasi. Aki-

batnya otoritas perdagangan berjangka dari sejumlah negara memperketat dan mempersempit ruang gerak para spekulasi. Sehingga, dengan adanya kebijakan itu transaksi komoditi semakin riil. Pelaku pasar tidak saja bertransaksi kontrak tetapi juga bertransaksi fisik komoditi," demikian antara lain disampaikan G.M Teoh, pialang CIMB Malaysia, yang menjadi salah satu narasumber pada seminar perdagangan berjangka komoditi di Medan.

Lebih jauh diutarakan G.M Teoh, beberapa tahun lalu para pelaku pasar crude palm oil- CPO mengacu harga Rotterdam, Belanda. Tapi seiring perkembangan bursa berjangka Malaysia, dan besarnya produksi CPO Malaysia, maka pelaku pasar mengacu harga CPO ke Malaysia.

"Tetapi sejak tahun 2007 produksi CPO Malaysia sudah lebih rendah dibandingkan Indonesia. Maka suatu saat nantinya Indonesia pun akan menjadi pasar terbesar dari komoditi CPO. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak dengan aktivitas transaksi CPO di BKDI," jelas G.M Teoh.

Apa lagi dengan dukungan penuh pemerintah, pasar berjangka komoditi di Indonesia akan lebih cepat berkembang. Seperti halnya penetapan Bea Keluar CPO ditentukan berdasarkan informasi harga bursa berjangka Indonesia, tambah G.M Teoh.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan, dengan amandemen undang-undang perdagangan berjangka komoditi, maka bangsa Indonesia memiliki harapan besar mewujudkan apa yang telah dicita-citakan sesuai Undang-undang No. 32/1997 dan perubahannya Undang-undang No. 10/2011, yaitu menjadikan bursa berjangka komoditi sebagai acuan harga, lindung nilai dan alternatif investasi. ▲

PASAR LELANG KOMODITI

Periode ke- 7 Tahun

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Transaksi PLKA Sulut Capai Rp 13,4 Miliar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut kembali berhasil memfasilitasi penjualan dan pembelian berbagai komoditi yang ada. Hal ini seperti nampak pada Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) periode ke tujuh, yang berhasil menciptakan transaksi sebanyak Rp 13,4 miliar.

Kepala Disperindag, Sulut, Sanny Parengkuan, mengatakan, PLKA yang berlangsung di Hotel Sahid Kawanua Manado itu, berhasil meningkat 23 persen dibandingkan periode sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 10,9 miliar.

"Peningkatan transaksi perdagangan tersebut menyusul semakin banyak volume komoditi yang diperdagangkan dengan harga jual yang lebih mahal," kata Parengkuan.

Menurut Parengkuan, transaksi komoditi jagung merupakan transaksi yang mendominasi nilai penyelenggaraan PLKA Sulut itu. Transaksi komoditi jagung mencapai Rp 7,8 miliar, atau sekitar 58,34 % dari total transaksi.

"Transaksi komoditi jagung mencapai 2.840 ton, dengan harga jual berkisar Rp 2.750 hingga Rp 2.950 per kilogram," jelas Parengkuan.

Sementara itu, diurutan kedua yang menyumbang transaksi terbesar adalah komoditi kentang donata, ditransaksikan dengan nilai Rp 2,4 miliar. Dari transaksi itu ada sebanyak 400 ton kentang yang diperdagangkan dengan harga Rp 6.000 per kilogram.

Sedangkan komoditi pala baik biji maupun bunga (fully) sebanyak 9 ton, mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 1,33 miliar atau 9,92 persen dari total transaksi.

Sanny Parengkuan, menjelaskan, PLKA Manado periode September 2011, itu, juga mentransaksikan komoditi yang lebih beragam dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya hanya terdapat sebanyak 10 komoditi, tetapi pada periode September 2011 mencapai 21 komoditi.

Lebih lanjut diutarakan Parengkuan, pihaknya sangat berharap transaksi PLKA terus berkembang dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah sepa-

kati bersama. Manfaat penyelenggaraan PLKA ini sudah semakin nyata dirasakan para pelaku komoditi. Hal itu sudah mulai tampak sejak penyelenggaraan PLKA periode ke tujuh. Pada penyelenggaraan PLKA itu sejumlah komoditi lokal ditransaksikan, seperti komoditi cengkih, coklat, dodol, gula merah, ikan, jagung, kedelai, kentang, kopra, pala, rumah panggung dan salak, harsu dikembangkan terus.

"Oleh karena itu kami selalu siap untuk memfasilitasi penyelenggaraan PLKA ini, dimana bisa mempertemukan pedagang dan pembeli," ungkapnya.

Sanny Parengkuan, menambahkan, saat ini banyak para produsen susah untuk memasarkan hasil produksinya. Dengan adanya PLKA ini dapat membantu dan meringankan para produsen. "Ada barang tapi sulit dipasarkan, pasar ini kita harapkan jadi solusinya. Ini merupakan jalan keluar dari pemasaran dari produsen atau petani," jelas Sanny Parengkuan. ▲

**Pengantar Redaksi;**

Buletin Kontrak Berjangka mendapat kesempatan istimewa wawancara khusus dengan Mahendra Siregar, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Kesempatan wawancara khusus itu sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan beliau dan lain hal, maka baru terlaksana pada 5 Oktober 2011. Kini beliau telah dipindah tugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Keuangan, per 20 Oktober 2011, lalu. Tentunya, apa yang menjadi topik perbincangan tersebut dan tugas yang selama ini diemban sebagai Wakil Menteri Perdagangan menjadi bekal dalam menduduki jabatan baru sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada wawancara tersebut, ada banyak hal yang dapat dipetik dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi. Lengkapnya wawancara yang dilakukan di ruang kerja Mahendra Siregar di Kementerian Perdagangan, itu, sebagai berikut;

Kontrak Berjangka Berbasis Industri Hilir

Tanya [T]. Dalam sebuah kesempatan Bapak mendeklarasikan bahwa perhitungan Bea Keluar (BK) crude palm oil (CPO) yang berlaku untuk bulan Oktober 2011, berdasarkan informasi harga dari salah satu bursa berjangka di dalam negeri. Bisa diutarakan prosesnya?

Jawab [J]. Sejak saya ditugaskan di Kementerian Perdagangan ini, memang saya pernah mengutarakan untuk perhitungan BK CPO Indonesia harusnya berdasarkan informasi harga dari dalam negeri. Karena, BK itu mencerminkan pasar di dalam negeri. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan menugaskan saya untuk menggolkkan BK CPO itu. Prosesnya cukup panjang, hampir satu tahun lebih saya mendekati berbagai instansi dan pelaku CPO. Pertanyaan miring pun banyak yang datang kepada saya. Seperti, 'kan sudah ada dua informasi harga CPO dari luar negeri yang digunakan, mengapa ditambah lagi? Volume transaksi dari bursa itu masih kecil dan jangan-jangan dalam dua atau tiga tahun lagi bursa itu sudah tidak memperdagangkan CPO? Apa memang sudah benar harga dari bursa itu sesuai dengan pasar? Apa sudah mendesak digunakan

informasi harga CPO dari bursa itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya mereka belum memahami. Tetapi intinya menurut saya adalah bagaimana meyakinkan mereka semua.

[T]. Menurut Bapak, apa implikasinya menentukan BK CPO itu berdasarkan informasi harga dari bursa dalam negeri?

[J]. Saya merasa itu bagian dari strategi yang ditujukan bagi kalangan industri CPO di dalam negeri untuk mendorong meningkatkan nilai tambah CPO. Dengan mengembangkan industri hilir CPO. Di sisi lain, bagi pemerintah menetapkan BK CPO sebagai sumber devisa, makanya kalangan eksportir menganggap BK sebagai membatasi pasar ekspor. Saat ini Indonesia produsen utama CPO, kalau seluruh produksi CPO dieksport, bagaimana industri hilir CPO bisa berkembang. Satu hal yang harus kita ketahui, semakin banyak kita memproduksi CPO dan membuka lebih luas lahan kepala sawit, tetapi tidak diikuti dengan permintaan pasar yang lebih tinggi, maka suatu saat nantinya harga akan rendah. Makanya kita tentukan BK CPO supaya ada pembatasan ekspor,

sehingga harga di luar negeri relatif stabil. Karena kita produsen dan kita berhak menentukan harga CPO dunia. Jadi, untuk mendapatkan kepastian suplai dan harga, pelaku pasar harus melalui mekanisme bursa berjangka.

[T]. Banyak pihak menilai BK CPO hanya menguntungkan pemerintah, apa pendapat Bapak?

[J]. Malaysia dulu sudah membatasi ekspor CPO. Tetapi mereka meringankan ekspor CPO ke negara yang industri CPO-nya ada di luar negeri. Selain itu, Malaysia menentukan kawasan atau negara yang boleh dieksport CPO, seperti Eropa dan Cina. Di luar negara-negara itu, ekspor CPO dibatasi. Makanya saya heran, mengapa ada orang yang bertanya kenapa CPO dibatasi eksportnya. Sama halnya dengan India. Mereka saat ini akan melindungi industri hilir CPO di dalam negerinya. Konon, ada usulan dari industri India untuk menaikkan tarif masuk minyak goreng yang berasal dari Indonesia. Makanya CPO yang masuk ke India relatif mahal, tetapi minyak goreng yang masuk ke sana lebih rendah. Dalam catatan perekonomian India, mi-

“Bursa harus berpikir mengembangkan kontrak berjangka komoditi yang berbasis industri hilir di dalam negeri”

nyak goreng merupakan komponen penting dalam keranjang pangan masyarakat India. Dan, harga minyak goreng menyumbang tingginya inflasi di India. Oleh karena itu pemerintah India mau melindungi industriya dan masyarakatnya.

[T]. Sekedar ilustrasi saja, bagaimana menurut Bapak industri CPO di dalam negeri saat ini?

[J]. Saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 22 juta ton, dan konsumsi di dalam negeri sekitar 30 %. Jadi masih cukup banyak kapasitas mengembangkan industri hilir CPO. Tetapi kalau tidak ada jaminan pasokan, bagaimana mau mengembangkan industri hilir CPO? Karena itu, di dalam master plan industri kelapa sawit, BK merupakan salah satu tools untuk memberi jaminan pasokan industri hilir. Saat ini sedang dikembangkan industri CPO yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan. Perlu kita ketahui, saat ini PDB Indonesia sudah mencapai US\$ 3.000 perkapita. Dengan PDB sebesar itu, tentunya kebutuhan konsumsi CPO pun semakin meningkat. Karena turunan CPO tidak melulu minyak goreng dan margarin, tetapi juga produk-produk toiletries seperti sabun, sampo, kosmetika, dan bahkan biofuel.

[T]. Saat ini ada dua bursa berjangka di Indonesia, tetapi kontrak komoditi primer masih terbatas, pada hal Indonesia merupakan produsen dari berbagai komoditi dunia. Dari kacamata Bapak, apa kelemahan kita?

[J]. Saya mau menjelaskannya begini, kita harus melihat secara keseluruhan supplai dan mata rantai pasokan dari berbagai komoditi tersebut. Karena dengan begitu, baik regulator, bursa dan para pelaku komoditi paham peran masing-masing di mana letaknya di rantai pasokan itu mulai dari hulu hingga hilir. Dengan memahami peran pentingnya di rantai pasokan itu, dia tahu memposisikan dan merepositori dirinya. Sehingga, tidak membatasi diri pada Tupoksi-nya saja. Misalnya, regulator tidak hanya membatasi diri pada pekerjaan yang rinci dan fokus. Tetapi juga mengerti keterkaitan para pelaku komoditi mulai dari hulu

hingga hilir. Dan, siapa para pelakunya pun harus dikenali. Sehingga kebijakan yang diambil bisa disinergikan mulai dari hulu hingga hilir dalam konteks sistem pasokan logistik. Bursa berjangka adalah salah satu dari bagian mata rantai pasokan logistik itu. Bursa hanya berperan menyediakan mekanisme perdagangan. Mereka tidak mengurus budidaya, eksplorasi, pemasaran komoditi, dan seterusnya. Tetapi, bursa pun harus tahu bagaimana komoditi itu bisa sampai ke tangan konsumen. ‘Nah, hal ini yang belum kelihatan dan kita lakukan.

[T]. Selain komoditi CPO, Bapak juga intens mengawal kebijakan industri komoditi kakao. Apa pendapat Bapak?

[J]. Di mata media memang kelihatan seperti itu. Komoditi kakao ini sama halnya dengan CPO. Para pelaku kakao maunya hanya ekspor gelondongan saja. Makanya sejak dua tahun lalu diberlakukan BK kakao. Tujuannya sama, yakni mengembangkan industri hilir kakao di dalam negeri. Di Malaysia, industri hilir dan pengolahan kakao berkembang pesat, pada hal produksi kakao mereka kecil dibandingkan dengan Indonesia. Cina pun demikian. Beberapa tahun lalu, Cina memiliki sebagian delapan industri hilir kakao. Tetapi sekarang tinggal dua. Hal itu dikarenakan mereka keterbatasan bahan baku, akibat BK kakao yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Makanya saat ini industri kakao Cina sudah mengimpor kakao olahan dari Indonesia.

[T]. Kebijakan apa lagi yang akan ditempuh pemerintah untuk mengembangkan industri hilir kakao di dalam negeri?

[J]. Saat ini komposisi kakao Indonesia 80 % orientasi ekspor, sedangkan sisanya 20 % untuk kebutuhan di dalam negeri. Tahun 2012, akan kita balik. Komposisi ekspor hanya 20 % sedangkan untuk kebutuhan industri hilir kakao di dalam negeri mencapai 80 %.

[T]. Bagaimana cara membalikkan komposisi itu?

[J]. Tentunya dengan berbagai cara. Misalnya, kita dorong industri hilir kakao dan pengenaan BK yang lebih tinggi. Di samping itu, ekspor kakao harus memenuhi SNI. Demikian juga dengan industrinya memiliki standardisasi. Kalau semua ini dilakukan dengan benar dan didukung sosialisasi, saya yakni industri hilir kakao yang terintegrasi akan berkembang di dalam negeri.

[T]. Seharusnya kebijakan pemerintah dibidang kakao itu ditangkap oleh bursa berjangka. Karena saat ini belum ada kontrak berjangka kakao di dua bursa berjangka.

[J]. Itulah yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Bursa berjangka pun harus mengetahui dan memahami dari setiap mata rantai pasokan logistik pangan. Jadi, apakah bursa berjangka sudah memahami posisi mereka di rantai pasokan logistik itu? Harusnya, dengan kebijakan pemerintah itu, bursa berjangka sudah siap-siap meluncurkan kontrak berjangka kakao. Karena, bursa berjangka merupakan salah satu mekanisme perdagangan yang menjamin ketersediaan pasokan dan referensi harga.

[T]. Apa saran Bapak untuk bursa dalam mengembangkan kontrak berjangka komoditi?

[J]. Saran sangat sederhana. Negara-negara industri berebut mengembangkan industrinya di Indonesia hanya untuk memenuhi pangsa pasar Indonesia.

[T]. Bagaimana menurut Bapak jika bursa kembangkan kontrak berjangka khas Indonesia?

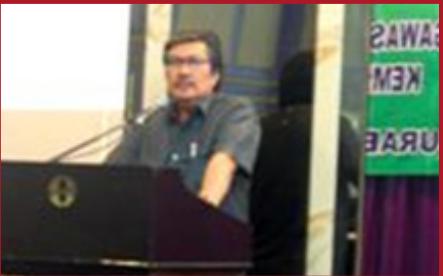
[J]. Saya sangat setuju. Bisa saja bursa membuat kontrak berjangka yang identik dengan daerah sentra produksi. Misalnya kontrak berjangka komoditi kopi Gayo, Toraja, Sidikalang, Lampung, dan Bali. Sentra produksi kopi dari berbagai daerah itu sangat terkenal di mancanegara, meski varietasnya sama tetapi karena struktur tanahnya yang berbeda-beda maka aroma yang dihasilkan pun berbeda. ▲



Agenda Foto



Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, menekan tombol tanda dimulainya perdagangan perdana komoditi syariah JFX'S. Perdagangan komoditi syariah ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas industri perbankan syariah nasional. Tahap awal ditargetkan transaksi harian komoditi syariah sebesar Rp 50 miliar. 13 Oktober 2011, Jakarta.



Kepala BAPPEBTI Syahrul R. Sempurnajaya membuka Pelaksanaan Penataan dan Penegaran Wakil Pialang Berjangka, bagi pelaku di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kepala BappebtI juga menyematkan secara simbolis pin ACI kepada peserta. 17-18 Oktober 2011, Surabaya.

Selama berada di Kota Medan, Kepala BappebtI, Syahrul R Sempurnajaya, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno, Dirut BKDI Megain Wijdaja, Sekertaris BappebtI Nizarli, Kepala biro perniagaan BappebtI Robert J. Bintaryo melakukan kunjungan ke perusahaan pialang Victory International Futures cabang Medan. 11 Oktober 2011.



Agenda Foto



Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, Kepala Bappebi Syahrul R Sempurnajaya dan jajaran pejabat Kementerian Perdagangan bersepeda santai dengan industri PBK dan SRG kegiatan ini di tujuhan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara industri perdagangan berjangka dengan Kementerian Perdagangan. 8 Oktober 2011, Ancol Jakarta.



Bappebi Menyelenggarakan Seminar PERdagangan berjangka komoditi di Kota Medan dan Kota Makassar. Seminar ini merupakan bentuk sosialisasi perubahan UU No. 32/1997, menjadi UU No. 10/ 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Narasumber mencakup pelaku pasar, Anggota Komisi VI DPR RI dan akademisi. 11 Oktober di Kota Medan, 26 Oktober 2011 di Kota Makassar.



Kepala Bappebi Syahrul R Sempurnajaya, Anggota Komisi VI DPR RI, Hendrawan Supratikno dan Dirut BKDI Megain Widjaja, melakukan dialog interaktif Perdagangan Berjangka Komoditi di TVRI Medan dan Radio Pas Fm Medan. 10 Oktober dan 11 Oktober 2011, Medan.

Resi Gudang Sebagai Bukti Daya Serap Komoditi Lokal

Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menginventarisasi kebijakan penyerapan komoditi lokal. Hal itu ditujukan untuk memperkuat dan mempercepat implementasi SRG di berbagai daerah.

Di samping itu, tingginya daya serap komoditi lokal akan memperkuat perekonomian secara nasional. Sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada komoditi impor. Dengan demikian kita dapat mengurangi pengaruh ancaman krisis global yang saat ini melanda beberapa kawasan.

"Saat ini kami Ditjen Perdagangan Laur Negeri, sedang melihat-lihat kebijakan mana yang bisa disinergikan dengan SRG. Terutama bagi pelaku importir pangan, nantinya akan disyaratkan kepe-

milikan Resi Gudang dapat dijadikan bukti daya serap lokal," tegas Deddy Saleh.

Seperti halnya importir beras ketan, tambah Deddy Saleh, kebijakan dari Kementerian Pertanian sudah tepat. Yakni mewajibkan kalangan importir untuk menyerap komoditi beras ketan sebelum importir tersebut melakukan impor beras ketan.

"Dari sisi kami pun nantinya begitu, akan ada kebijakan yang mensyaratkan Resi Gudang sebagai bukti tambah bagi importir sebelum melakukan impor," kata Deddy Saleh.

Sementara itu, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmojo, mengatakan, perubahan Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang yang menjadi Undang-undang No. 9/2011, memberi peluang semakin beragamnya jenis komoditi yang dapat dimasukkan dalam mekanisme SRG.

"Salah satu aspek penting dari perubahan undang-undang SRG tersebut yakni diwajibkannya resi gudang dengan skema colateral management agreement (CMA), tunduk pada undang-undang No. 9/2011. Itu artinya, skema CMA yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun akan mempercepat implementasi SRG," jelas Surdiyanto.

SRG dengan skema CMA terjadi antara tiga pihak, yakni pemilik komoditi, bank dan importir luar negeri. "Komoditi yang masuk dalam skema CMA ini nilai transaksinya cukup besar, tetapi kurang memiliki kekuatan dari sisi payung hukum. Oleh karena itu, perubahan Undang-undang SRG itu yang memasukan skema CMA akan menambah tingkat kepercayaan pelaku komoditi dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian kinerja SRG semakin terpercaya," jelas Surdiyanto Suryodarmojo. ▲

Kepercayaan Terhadap CPOTR Makin Tinggi

Volume transaksi kontrak berjangka CPOTR BKDI meningkat 67.361 lot dalam satu bulan perdagangan (26 Agustus - 28 September 2011).

Atau mengalami peningkatan sekitar 19,83 % dari periode sebelumnya yang mencapai 56.212 lot.

Menurut Dirut BKDI, Megain Widjaja, peningkatan volume transaksi CPOTR itu disebabkan antara lain, kinerja pada pelaku komoditi CPO sudah kembali normal pasca libur panjang hari besar keagamaan yang lalu.

Selain itu, kepercayaan para pelaku komoditi CPO semakin meningkat terhadap transaksi CPOTR BKDI, dikarenakan pemerintah berencana mengambil infor-

masi harga CPOTR sebagai basis perhitungan Bea Keluar CPO.

"Faktor kepercayaan ini sangat penting bagi pelaku pasar, sehingga mereka semakin yakin dengan transaksi mereka," jelas Megain.

Di samping itu, tambah Megain, sosialisasi kontrak berjangka BKDI terus menerus dilaksanakan. Sehingga jumlah para pelaku CPO semakin banyak yang bertransaksi di BKDI.

"Hingga akhir tahun 2011, kami optimistis bisa menggenjot volume transaksi CPOTR mencapai 5.000 lot per hari. Pada 27 September 2011, lalu, target transaksi itu sudah mendekati. Volume transaksi harian CPOTR sudah menyentuh angka 4.761 lot," papar Megain Widjaja. ▲





Desember 2011 BKDI Luncurkan Kontrak Solar

Untuk meningkatkan transaksi multilateral para pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri, BKDI merencanakan pada Desember 2011 mendatang meluncurkan kontrak berjangka minyak solar. Guna mendukung rencana tersebut, BKDI telah mengajukan izin kontrak berjangka komoditi minyak solar kepada otoritas perdagangan berjangka komoditi- Bappebti.

"Saat ini kami sedang lakukan persiapan transaksi kontrak berjangka solar. Kami sudah pengajuan izin Bappebti. Demikian juga dengan pihak Pertamina, sudah beberapa kali dilakukan perbincan-

gan. Dan nantinya Pertamina bertindak sebagai calon supplier minyak solarinya," ungkap Direktur BKDI, Arwadi J. Setiabudi.

BKDI akan mendapatkan suplai jenis solar non subsidi dari Pertamina dan perusahaan minyak swasta lainnya, seperti Shell dan Petronas.

Menurut Arwadi, produk ini rencananya akan berdenominasi rupiah, karena konsumen dan permintaannya juga dari pabrik-pabrik domestik dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Di samping itu, BKDI masih akan memberdayakan lebih kurang 25 broker untuk menyukseksikan kontrak berjangka solar.

"Target kami, dalam enam bulan pertama pasca launching, setidaknya bisa meraih volume transaksi 100 lot per hari," harap Arwadi. ▲



PP-PBK Wajibkan Daftar Ulang Pelaku SPA

Perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK) menjadi Undang-undang No 10/2011, membawa implikasi luas bagi perkembangan industri perdagangan berjangka di tanah air. Pembinaan, pengawasan dan sanksi yang lebih berat adalah aspek penting dari perubahan undang-undang PBK tersebut. Namun demikian, dengan perubahan undang-undang itu akan berdampak pada kemajuan industri PBK di masa mendatang.

Demikian antara lain diutarakan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, saat memberi penjelasan kepada wartawan di sela-sela acara Fun Bike, yang diselenggarakan industri PBK, 8 Oktober 2011,

Ancol, Jakarta.

"Salah satu aspek penting dari perubahan Undang-undang PBK itu adalah ditingkatkannya pengawasan sistem perdagangan alternatif (SPA). Selama ini memang sudah ada ketentuan dalam transaksi SPA, tetapi melalui perubahan Undang-undang PBK itu semakin diperkuat pengawasan dan sanksinya. Sehingga ke depan tidak banyak lagi permasalahan hukum terkait dengan SPA," kata Mari Pangestu.

Lebih jauh dijelaskan Mari Pangestu, saat ini pun sedang disusun Peraturan Pemerintah terkait dengan perubahan undang-undang PBK.

"Pada PP tersebut, nantinya akan diatur mekanisme transaksi SPA, dan para pelaku SPA akan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang. Dan saat pendaftaran

ulang itu, akan diketahui mana yang layak dan yang tidak layak melakukan transaksi SPA," jelas Mari Pangestu.

"Dengan adanya perubahan undang-undang PBK itu kita harapkan membuat kinerja pelaku pasar akan lebih tinggi. Karena pelaku pasar memiliki kemudahan untuk menentukan kontrak berjangka komoditi. Kalau dahulu untuk menentukan kontrak berjangka komoditi harus meminta izin dari presiden, sedangkan sekarang cukup dengan keputusan Kepala Bappebti," jelas Mari Pangestu.

Sehingga, tambah Mari, dengan perubahan ini akan semakin luas jumlah kontrak berjangka komoditi yang dapat diperdagangkan bursa berjangka. ▲

Thailand banjir harga karet ngacir

Bencana banjir yang melanda Thailand membuat kontrak berjangka komoditi karet untuk pengiriman Maret 2012 di bursa berjangka Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) Jepang, menguat hingga 324,7 Yen per kg. Kenaikan harga komoditas bahan baku ban ini juga dipicu curah hujan di negara produsen terbesar, Thailand, yang berpotensi mengganggu penyadapan Karet, dan menyebabkan rendahnya produksi lateks.

Thailand sebagai negara produsen terbesar komoditi karet yang mengalami peristiwa banjir akhirnya berdampak pada pasar karet di dalam negeri. Harga karet alam jenis slab bersih kadar karet kering (KKK) di pasaran Kota Jambi, mengalami kenaikan. Harga semua jenis laret mengalami kenaikan sebesar Rp 50 per kg hingga Rp 100 per kg.

Harga Karet slab bersih 100 persen juga terdongkrak menjadi Rp 34.700 per kg. Pada hal sebelumnya juga naik Rp 34.600 per kg, demikian juga karet slab

bersih 70 persen menjadi Rp 24.290 per kg dan slab bersih 50 persen berada pada level harga Rp 17.350 per kg.

Menurut beberapa kalangan pelaku pasar, naiknya harga komoditas ekspor itu juga dipicu besarnya permintaan konsumen dari negara-negara importir. Karena permintaan demikian besar dan Thailand sebagai negara produsen sedang mengalami musibah banjir maka harga terdongkrak naik. ▲

Harga Lada Melemah Persediaan Indonesia Menipis

National Commodity and Derivatives Exchange (NCDX) India, memperdagangkan komoditi lada dengan harga yang relatif melemah. Harga Lada berjangka untuk penyerahan November 2011, ditutup pada level harga INR 35.545 per ton dari harga sebelumnya INR 35.955 per ton.

Penurunan harga Lada dipengaruhi aksi pelaku pasar terkait pasokan Lada yang diperkirakan akan meningkat. Pada tahun 2010, India mengekspor 16.700 mt Lada senilai USD 3.040.000.000 sebagai

terhadap 21.300 mt senilai INR 3.33 miliar pada tahun 2009, menunjukkan penurunan yang signifikan sekitar 21 % dalam volume dan 9 % dalam nilai. Selama 2011, ekspor lada dari India diperkirakan meningkat seperti yang ditunjukkan oleh kinerja ekspor sampai dengan Agustus 2011. Selama Januari-Agustus 2011, ekspor lada dari India 13.400 mt seperti terhadap 11.700 mt pada periode yang sama tahun lalu, yang menunjukkan peningkatan 1.700 mt atau meningkat sekitar 14 %.

Sementara itu, Indonesia di tahun 2010 mengekspor 49.500 ton lada hitam senilai Rp 173.730.000 atau meningkat

dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 39.150 mt senilai USD 92.570.000. Dari nilai tersebut, sebesar 95 % dikirim dari Lampung. Sedangkan selama Januari-September 2011, ekspor lada hitam dari Indonesia diperkirakan hanya 19.000 ton.

Akibat mulai berkurangnya persediaan di Kota Palembang, membuat harga lada putih mengalami kenaikan. Harga lada putih berada pada level harga Rp 98.000 per kg. Harga tersebut tergolong tinggi bila dibandingkan bulan Agustus lalu yang berada pada level harga Rp 86.000 per kg. ▲

Eksport Meningkat Petani Kakao Makin Tajir

Implementasi bea keluar biji kakao menghidupkan kembali industri pengolahan kakao nasional. Tahun ini, 5 pabrik kakao yang mati suri sudah berproduksi kembali dan 2 pabrik lagi diharapkan mulai beroperasi tahun depan. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Sindra Wijaya, mengatakan, implementasi PMK No. 67/2010 tentang Penetapan Bea Keluar (BK) Kakao, konsumsi biji kakao oleh industri dalam negeri meningkat menjadi 180.000 ton pada 2010 dari 125.000 ton pada 2009. Tahun ini, industri kakao dalam negeri diprediksi menyerap 280.000 ton biji kakao.

Dari peningkatan penyerapan industri domestik tersebut, Sindra mengharapkan

cocoa powder, cocoa butter dan cocoa cake Indonesia bisa mencapai 200.000 ton pada 2012.

Data Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa ekspor kakao olahan Indonesia meningkat dari US\$142 juta pada Januari-Mei 2010 menjadi US\$216,4 juta pada tahun ini. Ekspor cokelat untuk periode yang sama naik dari US\$12,2 juta dari tahun lalu menjadi US\$16 juta pada 2011.

Di sisi lain, ekspor biji kakao turun dari US\$448,3 juta pada 3 bulan pertama tahun lalu menjadi US\$289,4 juta pada 2011.

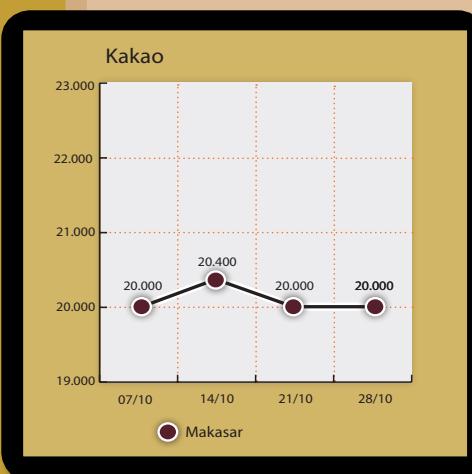
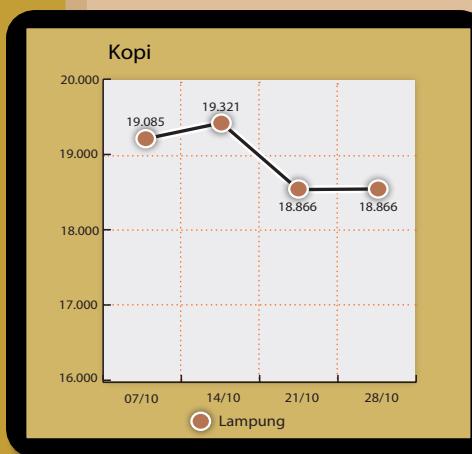
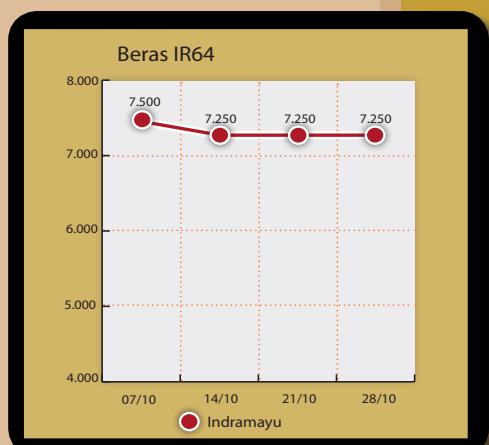
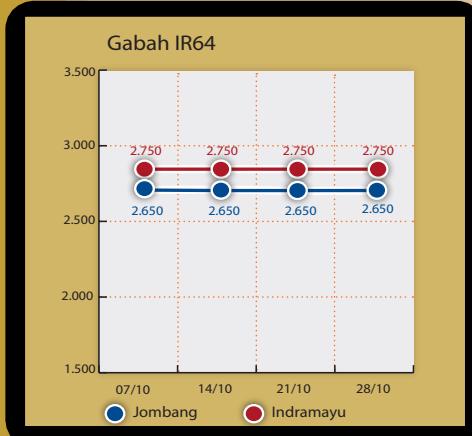
Sindra menambahkan bea keluar juga meningkatkan harga jual biji kakao Indonesia di pasar luar negeri karena berhasil

menurunkan potongan harga yang diberikan pada biji kakao nonfermentasi. " Untuk mendorong daya saing industri kakao dalam negeri, pemerintah harus segera menerapkan standar nasional (SNI) untuk biji kakao agar kualitas bahan baku industri kakao olahan membaik," jelasnya.

"Penerapan tata niaga biji kakao merupakan cara yang lebih baik dalam mendorong hilirisasi industri kakao dari pada penerapan BK bagi produk olahan biji kakao seperti yang telah dipraktikkan untuk produk setengah jadi industri kelapa sawit," kata Sindra. ▲

infoharga.bappebt.go.id

Harga Komoditi (Rp/Kg)



Minyak Atsiri Bangle Makin Kesohor

Indus - tri farmasi nasional saat ini sungguh banyak menggunakan bahan baku berbasis minyak atsiri bangle. Atau lebih dikenal dalam bahasa Latin zingiber cassumunar. Meski sudah banyak digunakan industri farmasi dalam berbagai produk kesehatan, minyak atsiri bangle dalam dunia perdagangan belum banyak dikenal. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya kajian hingga promosi dari berbagai pihat yang menggunakan bahan baku bangle sebagai produk-produk kesehatan. Pada hal, komoditi bangle merupakan salah satu jenis tanaman asli dari Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, bangle sangat dikenal karena berbagai khasiat yang dikandung. Bangle banyak digunakan dalam bentuk pengobatan alternatif, seperti dalam bentuk jamu. Hal ini karena rasanya yang sangat pahit dan pedas dilihat. Sebab itu, bangle sangat jarang digunakan dalam bumbu dapur.

Tanaman bangle merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini tumbuh dan berkembang baik di wilayah tropis. Oleh karenanya, tanaman ini juga dapat ditemui di beberapa negara Asia lainnya.

Masyarakat di Pulau Jawa, bangle dibudidayakan di pekarangan rumah atau pada tempat-tempat yang cukup mendapat sinar matahari. Tanaman bangle pertumbu-

buhannya cukup baik mulai dari dataran rendah hingga 1.300 m dpi. Tanah yang disukai tanaman ini basah tetapi tidak menyimpan banyak air. Karena jika terlalu banyak air maka mengakibatkan rimpun membusuk.

Ciri khas bangle sangat mirip dengan lengkuas dan jahe. Maka dari berbagai penelitian, bangle kekategorikan dalam keluarga lengkuas dan jahe.

Bangle merupakan tanaman semusim, tumbuh tegak, tinggi 1-1,5 m, membentuk rimpun yang agak padat, berbatang semu, terdiri dari pelepas daun yang dipinggir ujungnya berambut sikat. Daun tunggal, letak berseling. Helaian daun lonjong, tipis, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi rata, berambut halus, jarang, pertulangan menyirip, panjang 23-35 cm, lebar 20-40 mm, warnanya hijau.

Bunganya berbunga majemuk, bentuk tandan, keluar di ujung batang, panjang gagang sampai 20 cm. Bagian yang mengandung bunga bentuknya bulat telur atau seperti gelendong, panjangnya 6-10 cm, lebar 4-5 cm. Daun kelopak tersusun seperti sisik tebal, kelopak bentuk tabung, ujung bergerigi tiga, warna merah menya. Bibir bunga bentuknya bundar memanjang, warnanya putih atau pucat.

Tanaman bangle mempunyai rimpang yang menjalar dan berdaging, bentuknya

hampir bundar sampai jorong atau tidak beraturan, tebal 2-5 mm. Permukaan luar tidak rata, berkerut, kadang-kadang dengan parut daun, warnanya coklat muda kekuningan, bila dibelah berwarna kuning muda sampai kuning kecoklatan. Rasanya tidak enak, pedas dan pahit. Bangle digolongkan sebagai rempah-rempah yang memiliki khasiat obat. Panenan dilakukan setelah tanaman berumur satu tahun. Sedangkan untuk perbanyaktan tanaman ini cukup dengan stek rimpang.

Panen rimpang dilakukan setelah tanaman berumur 1 tahun. Produksi 10-30 ton/ha. Rendemen minyak 0,35 % sehingga produksi minyak 35-105 kg/ha/tahun.

Sifat umum yang mudah dikenal pada bangle adalah rasanya pahit, pedas dan aromanya membuat kepala merasa berat dan menghangatkan. Tanaman ini tidak pernah digunakan sebagai bahan makanan dan digolongkan sebagai tanaman yang memiliki khasiat obat.

Kandungan kimia yang terdapat pada rimpang bangle adalah sineol dan pinen, alkohol, keton, fenol, terfene dan gula, resin, flavanoid, zat pati dan tanin.

Pemanfaatan minyak atsiri bangle umumnya untuk industri farmasi sebagai bahan produk-produk obat anti piretik (penurun panas), karminatif (peluruh kentut), ekspektoran (peluruh dahak), laksan (pencahar), vermifuge (obat cacing) dan pembersih darah yang bermanfaat untuk menjaga kesimbangan serta kesehatan tubuh. ▲

Anti Obesitas

Bangle tanaman herbal khas Indonesia ini, dari penelitian yang dilakukan salah satu produsen obat ternama, ternyata dapat mengatasi masalah obesitas atau kegemukan. Hal ini dikarenakan bangle mengandung senyawa aktif yang dapat meningkatkan aktivitas enzim lipase. Enzim inilah yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak tubuh serta memperbaiki sistem pencernaan.

Untuk memudahkan masyarakat mengkonsumsi produk tersebut, PT Liza Herbal Internasional, telah memproduksi dalam bentuk kapsul yang diberi merek Bangle Dr. Liza.

Di sisi lain, memanfaatkan khasiat bangle sebagai pengobatan alternatif, bisa dilakukan dengan cara yang relatif sederhana.

Berikut ini khasiat bangle untuk beberapa penyakit ringan yang sering dijumpai pada masyarakat;

1. Demam, masuk angin.

15 g rimpang bangle yang segar dicuci lalu diparut. Tambahkan 1/2 cangkir air panas dan 2 sendok makan madu. Diaduk merata lalu diperas dan disaring, minum. Lakukan 2 kali sehari.

2. Perut mules:

Rimpang bangle, rimpang jahe, kencur dan lempuyang wangi, masing-masing 1/2 jari tangan dicuci lalu diiris tipis-tipis. Rebus dengan 1 gelas air bersih sampai tersisa 1/2 gelas. Setelah dingin disaring, lalu diminum.

3. Sakit kepala karena demam:

Rimpang segar secukupnya dicuci bersih lalu

diparut. Tambahkan sedikit air sampai menjadi adonan seperti bubur. Dipakai sebagai pilis pada dahi.

4. Sakit kuning:

1/2 jari rimpang bangle dicuci bersih lalu diparut. Tambahkan air masak dan madu masing-masing 1 sendok makan. Peras dan saring, minum. Lakukan 2 kali sehari.

5. Nyeri sendi (rheumatism):

Rimpang segar secukupnya dicuci lalu diparut, tambahkan arak sampai menjadi adonan seperti bubur encer. Borehkan kebagian sendi yang sakit.

6. Mengcikilan perut setelah melahirkan:

Rimpang bangle secukupnya dicuci lalu diparut, borehkan pada perut.

7. Cacingan:

3 jari rimpang bangle, 2 jari temu hitam, 5 biji ketumbar dan 5 lembar tangkai daun sirih dicuci lalu diiris tipis-tipis, kemudian ditumbuk halus. Tambahkan 1/2 cangkir air masak, diaduk merata lalu diperas dan disaring. Minum.

8. Radang seiput lendir mata:

Rimpang bangle dan kunyit sebesar 1 buku jari tangan dan 13 butir jinten hitam dicuci bersih lalu dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 1 gelas air bersih sampai tersisa setengahnya. Setelah dingin disaring, minum.



9. Kegemukan / mengurangi lemak tubuh:

a. Sepotong rimpang bangle dan 7 lembar daun jati belanda dicuci lalu direbus dengan 1,5 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, dibagi untuk 2 kali minum. Pagi dan sore hari.

b. 1/2 jari rimpang bangle, 1/2 jari rimpang temu giring, 3/4 jari rimpang lempuyang wangi, 1/4 genggam daun kemuning, 1/4 genggam daun jati belanda, 3 jari gula enau, dicuci dan dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 4 1/2 gelas air bersih sampai tersisa 1/2nya. Setelah dingin disaring, minum. Sehari 3 x 3/4 gelas.

c. Rimpang bangle dan rimpang temu hitam, masing-masing 1/2 jari tangan, dicuci lalu diparut. Tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis dan 2 sendok makan madu, aduk merata sambil diremas-remas. Peras dan saring, minum. Lakukan 2-3 kali sehari. ▲



Regional rubber market will be established soon

Indonesia, Malaysia and Thailand as biggest production country of rubber commodity are planning to establish regional market. Rubber production from those three countries reached approximately 70% of world production. The conversation to establish regional market for that rubber commodity was sharpened on the 19th yearly meeting of International Tripartite Rubber Council (ITRC) at Kuala Terengganu, Malaysia on last July 4th - 9th 2011. Completing that ITRC plan discussion, the same meeting has been held in Bangkok, Thailand on 23rd - 27th of August 2011. Following up those 2 meeting, Indonesia was pointed to hold another meeting on December 2011 in Bali.

Chief of Coftra, Ismadjaja Toengkagie, supported the idea of establishing region-

al market of rubber commodity between those three countries. "The concept came up on those two meetings was there will be future exchanges on each country that will trade rubber future contract with the same specification and in dollar currency."

"With this plan we don't need to establish new exchange that is specialized in rubber contact trading, because Indonesia already has two futures exchange," he said. But in addition Coftra hasn't decided which futures exchange that will be appointed, because there are still so many considerations and studies needs to be done to decide that exchange.

"From those two meetings, basically there are two options that came up in the middle of discussion, whether the market establishment will be using futures market or physical market. But the tendency

from that discussion is to establish new exchange market," Ismadjaja explained.

"Our consideration in agreeing the establishment of rubber futures market is the efficiency & effectiveness. If we compare with establishing physical market, we will need sufficient warehouse infrastructure. But if we are using futures exchange, buyer will only need destination for delivery from those three countries," Ismadjaja explained.

Moreover Ismadjaja also said, those three countries are biggest production country in the world but don't have instrument to control the price. Instead, another country, Japan has instrument for futures trading of rubber commodity." So it will motivation for those three countries to establish futures market of rubber commodity," Ismadjaja Toengkagie explained. ▲

Indonesian commodity & derivative exchange as basic of Indonesian crude palm oil (CPO) customs exit

Government pushed the creation of crude palm oil (CPO) price and market in Indonesia by acknowledging futures exchange price as basic calculation or CPO customs exit. Naturally, Indonesia is the biggest CPO market in the world because Indonesia is the biggest CPO producer. All this time, from so many export commodities that custom exit are set, government always refers to foreign commodity market.

Government set CPO custom exit based on price information that was happening in Malaysia futures exchange and CPO physical market Rotterdam, Belanda. Currently government in setting in CPO custom exit has adopted price from CPO futures contract that was marketed in Indonesian commodity & derivative exchange.

For government, the establishment of CPO customs exit will be revenue for country that is achieved from export performance of palm tree industry sector. Moreover, government's strategy in establishing CPO customs exit is intended for the effectiveness in maintaining price stability of domestic cooking oil, guarantying CPO supply for domestic industry and encouraging the growth of downstream palm oil industry.

The deputy minister of Trading, Mahendra Siregar, said, currently government in deciding CPO custom exit is still referring to futures exchange in Jakarta. "Although in fact, not all customs exits are based on current price at futures exchange," Mahendra siregar explained recently in Jakarta.

"Our strategy is to gradually setting up CPO custom exit calculation. All price referral are from foreign market which is Malay-

sia exchange and Rotterdam physical market. Currently domestic futures exchange also has been added," Mahendra Siregar explained.

We will monitor the development of CPO price from that futures exchange, so in medium-term or at least next year, we will evaluate whether it's possible to use domestic price referral. "If the domestic price is already significant, we will use the price source of that futures exchange."

"Government will establish CPO customs exit for October 2011 by using price referral from Jakarta futures exchange," Mahendra siregar said.

Moreover Mahendar Siregar said, by using CPO price information from Jakarta futures exchange, both futures exchange and market participants have to be strengthened so that market will reflect the real market. ▲

MPOA member explores Indonesian Commodity & Derivative Exchange member

Indonesia as the biggest CPO production country in the world, always considers other productions countries. Moreover Indonesia currently has commodity futures exchange that has CPO futures contract trading.

With that status, Malaysia our neighboring country that is also CPO producer will take Indonesia in count and is considering the possibility of regional cooperation in CPO marketing sector.

That step is started by the visit of Malaysia Palm Oil Association (MPOA) in the middle of last September 2011, to Indonesia Commodity & Derivative Exchange (ICDE). MPOA visit to ICDE was led directly by MPOA chairman Mr. Martin Beck.

MPOA is a group of CPO Malaysia association which consists of IOI Corporation, Genting Plantation, Sime Darby Plantation, Kuala Lumpur Kepong Plantation and United Plantation.

According to ICDE president, Megain Widjaja, MPOA visit that was led by Mr. Martin Beck, has purpose for learning more the specification of CPOTR contract which is considered more relevant because amongst the palm oil plantation in Indonesia some belongs to Malaysian.

"Based on that fact, MPOA wants to establish close cooperation with ICDE and Malaysian Palm oil Industry people in Indonesia," Megain said.

With that good will, Megain added, ICDE will be more opened in having coop-

eration. Moreover MPOA has promised to do socialization on CPOTR futures contract on events that were held by MPOA

"The other point that makes us more proud, some of MPOA member expressed their interest in becoming member of ICDE. This point was mentioned by them after they directly saw the CPOTR contract and also the trading system that is used by ICDE," Megain explained.

Hopefully MPOA will to have cooperation with ICDE can be manifested in short time. So Indonesia will be the real CPO producer and world main market in the future, Megain Widjaja added.▲

August non-oil export value is the highest in the history

August export performance in August reached the highest record in the middle of global crisis impact awareness.

Indonesia export performance in August 2011 was strengthened back and reached US\$ 18,8 billion, increasing 37,1% compare with the same month last year 2010, or increasing 8% from the previous month. Total export in August was the highest monthly export so far, broke the previous highest record in June 2011 for US\$ 18,4 billion.

The achievement of that export performance was supported by the increasing of non oil export for 25,5% or US\$ 14,7 billion. Therefore, in cumulative Indonesia total export from January to August 2011

reached US\$ 134,8 billion, increased of 36,6% compare with last period in 2010," Chief deputy of trading Mahendra Siregar explained in press conference at Trading Minister office in early October 2011.

"If we consider the movement, non-oil or oil export growth is always above 30%. In total moving average annual growth rate experienced growth for 33,8%. If the annual export movement can be maintained over 30% up until end of 2011, our total export will be more than US\$ 200 billion," Mahendra emphasized.

The non-oil export performance in 2011 was sustained by diversification of non-oil export market especially to FTA associated countries and others emerging market. China is one of main country destination Indonesian non-oil export for period

of January - August 2011, he added.

Along January - August 2011 non-oil export to China increased for 56,2%, faster than export to other countries. Moreover non-oil export to India also increased significantly after FTA for about 49,3% replacing Singapore and Malaysia.

Besides China and India, ASEAN countries and other Asia are main market of Indonesia non-oil export. Export contribution to ASEAN market, RRT, India, Japan and North Korean contributes 56,8% to national non-oil export.

"With this market structure, economical crisis that hit Europe and US area will not be impacting our export performance. But still we need to stay alert." Mahendar Siregar emphasized.▲

Pembentukan Pasar Karet Regional



Konsep membangun pasar komoditi karet regional adalah salah satu rekomendasi dari Laporan Kelompok Kerja Stabilisasi Harga Karet Alam yang terdiri dari tiga negara besar produsen karet dunia, masing-masing Thailand, Indonesia dan Malaysia.

Rekomendasi dari kelompok kerja ini diantaranya menyebutkan, membangun pasar karet regional adalah untuk melengkapi peran dari informasi kontrak berjangka komoditi karet yang diperdagangkan bursa berjangka TOCOM, Jepang. Di samping itu, dengan pasar karet regional tersebut dapat mencerminkan posisi perdagangan fisik komoditi karet dari tiga negara produsen karet dunia. Selain itu juga, dengan pasar regional karet para pelaku bisa melakukan arbitrase dari dua pasar yang berbeda yakni perdagangan berjangka dan pasar fisik.

Rekomendasai kelompok kerja dari tiga negara produsen karet itu dilatarbelakangi dari volatilitas pasar komoditi karet yang terjadi pada tahun 2008. Di mana ketika itu, pasar keuangan dunia menghadapi 'tsunami' akibat serangan para spekulasi yang juga bertansaksi di TOCOM. Dan di pihak lain, negara-negara produsen komoditi termasuk Thailand, Indonesia dan Malaysia tidak berdaya menghadapi gelombang 'tsunami' dari aksi para spekulasi.

Sejatinya, jika di salah satu negara

produsen karet tersebut terdapat pasar regional yang didukung negara-negara produsen karet maka dampak dari 'tsunami' pasar keuangan itu dapat diminimalisir. Dan bahkan, dapat mengurangi dampak merusak harga komoditi terutamanya komoditi karet.

Meski pun negara-negara penghasil utama seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia menghasilkan lebih dari 70 % karet alam dunia, sayangnya dimasing-masing negara itu tidak memiliki suatu pasar berjangka yang mapan, yang dapat memberikan harga dasar penemuan dan fungsi lindung nilai. Sebagai akibatnya, para produsen harus bergantung pada dan ditentukan oleh TOCOM dan SHSE, yang telah didominasi para spekulasi.

Pasar kontrak berjangka komoditi karet sesungguhnya telah berkembang di tahun 1970-an. Dan di tahun 1980-an, bursa berjangka London melayani transaksi dari kalangan konsumen dan spekulasi. Bursa berjangka Singapura melayani para produsen dan konsumen, sedangkan bursa berjangka Kuala Lumpur melayani produsen dan dealer. Masing-masing bursa berjangka itu memainkan perannya dan dilengkapi satu sama lain melalui bisnis arbitrase. Tetapi kemudian, bursa berjangka TOCOM terbatas pada para spekulasi di Jepang.

Namun, situasi itu membuat pasar menjadi tidak kompetitif dan belum sehat untuk pengembangan pasar.

Konsep Pasar Karet Regional

Pasar karet regional adalah hanya sebuah konsep, hal itu mungkin atau tidak mungkin harus secara fisik ditempatkan dalam pertukaran tunggal. Idenya adalah untuk memiliki beberapa kontrak dengan istilah umum dan kondisi, perdagangan yang sama dengan aturan regulasi tertentu saja. Idealnya komoditi karet diperdagangkan oleh sebagai besar pelaku komoditi karet dari semua negara anggota bursa atau dalam pertukaran tunggal jika diperlukan. Pelaku komoditi karet dapat berpartisipasi dalam salah satu atau di tiga pasar sekaligus, tergantung pada keunggulan komparatif transaksi di masing-masing pasar.

Hal itu dimaksudkan untuk membangun sebuah pasar yang besar dan kuat yang tidak hanya akan melayani kepentingan para produsen, tetapi juga memenuhi tujuan ganda dari bursa berjangka yang sukses dalam membentuk harga dan lindung nilai.

Oleh karena itu alasan untuk membangun pasar karet regional adalah untuk mengembalikan peran negara produsen dalam menentukan pasar yang lebih besar, menentukan harga dan memastikan aktivitas pasar yang mencerminkan negara-negara tersebut sebagai produsen karet terbesar dunia.

Rekomendasi dan pendekatan untuk mewujudkan pasar karet regional

Ada dua pendekatan mendirikan pasar karet regional, yang mengatur pertukaran merek baru dengan partisipasi berkomitmen dari ke tiga negara penghasil utama komoditi karet. Di samping itu, untuk mengaktifkan atau menghidupkan kembali kontrak berjangka di berbagai bursa di negara-negara penghasil dan memberikan kerangka waktu untuk menggabungkan atau mengkonsolidasikan mereka akhirnya membuat pasar karet tunggal regional.

Masing-masing pendekatan akan memiliki kelebihan dan kekurangan.

a) Menetapkan pasar karet regional dengan tahapan

Saat ini, ada kontrak berjangka karet yang ada di bursa berjangka pertanian Thailand (AFET), bursa berjangka Malaysia. Namun, kontrak karet dimasing-masing bursa itu ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif diperdagangkan. Inilah yang menjadi persoalan tersendiri dalam membuat kerangka infrastruktur perdagangan, kontra, aturan perdagangan, fasilitas kliring, kerangka hukum dan pengawasan dari masing-masing negara. Kendala utama dari pendekatan ini adalah perlunya menselaraskan dari masing-masing bursa untuk melakukan transaksi, standardisasi kontrak, aturan perdagangan dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan. Di sisi lain, pendekatan ini memiliki nilai positif dan sederhana, ekonomis, menghemat waktu dan fleksibel.

b) Menetapkan pasar karet regional

Untuk mendirikan sebuah pasar karet regional, perlu perencanaan yang cermat dan rinci, membutuhkan tenaga dan waktu dan tentunya materi yang didukung tenaga profesional. Selain itu, masalah lokasi perdagangan, penyertaan modal, keanggotaan, teknis operasional, pengaturan gudang, kerangka peraturan pemerintah dan kebijakan politis, memerlukan proses dan waktu yang lumayan panjang.

Namun, dengan cara ini memiliki keunggulan untuk membentuk tahap awal berdirinya pasar karet regional. Mengingat lingkungan pasar ini, realitas politik dan ketidakpastian keberhasilan dalam operasi pasar karet regional, mengadopsi pendekatan pertama mungkin menjadi pilihan terbaik, yaitu menghidupkan kembali kontrak berjangka karet di bursa negara-negara penghasil karet dengan mengatur waktu frame untuk bergerak menuju sebuah pasar tunggal regional.

c) Langkah sebelum berdirinya pasar karet regional

Selama masa dibentuk, langkah-langkah untuk menyalaraskan dan standardisasi aturan perdagangan, istilah kontrak, kerangka peraturan dan struktur fidusia serta mendirikan badan sengketa disinkronisasikan dengan cermat serta dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, pertukaran anggota dapat mempertimbangkan kemungkinan menghubungkan atau daftar silang kontrak satu sama lain sebagai langkah sementara menuju pasar karet tunggal regional.

Pada tahap akhir, syarat dan kondisi untuk merger harus dirundung jika pasar tunggal ini di pertimbangkan.

Sebuah perdagangan yang sehat dan layak memerlukan beberapa unsur, sebagai berikut:

- Kontrak yang universal (mencakup tipe / kelas, ukuran lot, mata uang, bulan perdagangan, tanggal penyelesaian & harga, margin call, dan serah fisik).
- Jaminan kontrak
- Efisien Kliring
- Fasilitas infrastruktur fisik seperti sistem TI, fasilitas pelabuhan pengiriman, pengangkutan transportasi, bea cukai, pergudangan, forwarding dan pemasaran
- Memperluas daftar pemasok yang disetujui untuk meningkatkan serah fisik
- Biaya yang murah dan mudah untuk memfasilitasi perdagangan
- Aturan transaksi yang transparan dan aturan yang minimal dari pemerintah untuk meredam pergerakan mata uang asing
- Aksesibilitas transaksi layanan untuk anggota dan pemain di seluruh dunia
- Kemudahan bagi anggota untuk posisi masuk dan keluar pasar
- Kebijakan pemerintah yang ramah dan pro-bisnis dengan birokrasi yang minim dari gangguan
- Mengadopsi perspektif regional / global
- Edukasi terus-menerus, kampanye dan promosi terhadap perlunya lindung nilai sebagai salah satu alat untuk manajemen risiko dan alternatif investasi.

Opsi pasar karet

a. Pasar fisik.

Pasar fisik karet saat ini mapan di tiga negara produsen utama dan melayan imasing-masing produsen efisien. Namun ada kebutuhan untuk membentuk pasar regional untuk tujuan tersebut, yang dapat menyebabkan biaya bisnis yang lebih tinggi dan ineffisiensi penyimpanan atau logistik.

b. Pasar Berjangka

Pasar berjangka kontrak karet pasar akan melakukan antara lain, fungsi ganda dalam membentuk penemuan harga dan lindung nilai. Selain itu, melalui bursa berjangka pasar fisik itu akan menyediakan outlet alternatif bagi mereka yang ingin membeli atau menjual karet fisik melalui pertukaran dengan keuntungan tambahan kontrak yang dijamin.

c. Gabungan pasar fisik dan pasar berjangka



*) Subagiyo,
KaBag Pengawasan Transaksi Bappebti

DEMUTUALISASI PERGESERAN ORIENTASI BURSA

Konsep demutualisasi bursa berjangka sebenarnya sudah jauh hari dibicarakan sebelum Undang-Undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi akan diamandemen oleh DPR RI. Pemerintah pun mendorong bursa berjangka melakukan demutualisasi, dan hal ini pun mendapat sambutan dari pihak bursa berjangka selaku Self Regulatory Organization (SRO). Dari sisi SRO, demutualisasi bursa berjangka sangat penting mengingat saat ini bursa hanya mengandalkan pendapatan dari komisi transaksi yang sifatnya berdasarkan kesepakatan dengan para anggota bursa.

Rencana demutualisasi bursa berjangka makin jelas setelah salah satu dari usulan amandemen dari Rancangan UU No. 32/1997, memasukan klausula tentang demutualisasi bursa berjangka. Pelaku bursa berjangka pernah mengatakan, bahwa bursa berjangka diwajibkan melakukan demutualisasi maksimal satu tahun pasca berlakunya undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK) hasil amendemen. Kewajiban tersebut tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah dibahas antara DPR dengan pemerintah dalam hal ini Bappebti.

Melihat urgensi dan kepentingannya, demutualisasi sangat diharapkan oleh bursa selaku SRO, mengingat perkembangan bursa berjangka selama ini belum berkembang baik terutama likuiditas transaksinya. Saat ini transaksi perdagangan berjangka lebih banyak mengandalkan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di luar bursa dibandingkan dengan transaksi komoditi primer di bursa berjangka itu sendiri, seperti Crude Palm Oil, Olein, Emas dan turunannya.

Untuk itu, Indonesia perlu membuka kran lebih besar ke arah pertumbuhan bursa dengan mendorong terbentuknya bursa baru seperti saat ini yakni dari satu bursa

menjadi dua bursa. Hal ini tentunya dalam upaya mendorong sesama bursa agar lebih maju dan kompetitif. Tanda-tanda kearah kemajuan sebenarnya sudah terlihat walaupun tidak signifikan.

Kemudian pertanyaannya, apakah dikarenakan bursa berjangka dijalankan atas dasar kebersamaan semata dan bersifat sukarela dan tidak berorientasi profit sehingga bursa tidak leluasa untuk mengembangkan dirinya menjadi bursa yang mandiri seperti layaknya bursa-bursa lain di dunia?

Jika kita melihat latar belakang lahirnya PBK di Indonesia tidak lepas dari mana asal perdagangan berjangka tersebut dilahirkan, yaitu dari Amerika Serikat. Negara adi daya ini memiliki sejarah panjang tentang perdagangan berjangka. Sejarah pertama kali munculnya pasar berjangka pada awalnya di Chicago dengan dibukanya Chicago Board of Trade (CBOT) pada tahun 1848. Kebakaran hebat yang melanda ladang gandum di Chicago pada tahun 1871 menginspirasi dilakukannya konsep lindung nilai (hedging) melalui PBK (futures trading) yang nilai-nilainya sebelumnya telah diadopsi dari kontrak forward (forward contract) pada tahun 1860 di CBOT. Sejak itu, dasar pembentukan struktur kontrak berjangka mengacu kepada nilai-nilai yang telah dianut sebelumnya dalam kontrak forward di bursa Amerika Serikat.

Membership organization

Hal penting yang perlu diketahui bahwa dalam kontrak berjangka selalu diperdagangkan di bursa terorganisir, anggota bursa bersifat sukarela dan merupakan membership organization sebagaimana yang dilaksanakan CBOT saat itu yang merupakan salah satu tipe bursa terbesar dan tertua di dunia. Selanjutnya prinsip dasar tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini, yaitu

perdagangan berjangka dilakukan di bursa terorganisir, organisasi bursa adalah bersifat sukarela, non profit dan merupakan membership organization.

Kontrak berjangka memiliki bentuk kontrak standar berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan seperti mutu, jenis dan harga yang jelas. Kontrak berjangka memiliki lembaga kliring yang memberikan jaminan secara penuh terhadap penyelesaian transaksi atas kontrak berjangka. Persyaratan dalam pembayaran perdagangan berjangka dilakukan dalam bentuk margin. Kontrak berjangka memiliki jam perdagangan dan penutupan perdagangan setiap hari (daily settlement). Setiap posisi berjangka dapat ditutup setiap saat.

Pada dasarnya PBK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32/1997, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh bursa-bursa internasional lainnya di seluruh dunia, karena konsep dasarnya mengacu pada prinsip perdagangan berjangka di Amerika Serikat.

Bursa berjangka memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan pasar forward (forward market) atau pasar fisik lainnya yang biasa kita kenal. Bursa berjangka (futures exchange) didirikan oleh para anggota atas dasar kepentingan yang sama (membership organization) bersifat sukarela dan berorientasi non profit semata-mata untuk kepentingan perlindungan usaha para anggota khususnya petani, pedagang dan prosesor komoditi yang membutuhkan sarana lindung nilai (hedging) dari kerugian yang diderita akibat adanya fluktuasi harga yang terkadang sulit untuk diprediksi. Maka, setiap anggota perlu tergabung dalam sebuah organisasi bursa berjangka.

Sejak dulu hingga saat ini, bursa berjangka masih memegang teguh prinsip klasik tersebut, di mana bursa wajib memberi perlindungan bagi para anggota yang tergabung dalam kegiatan perdagangan



"Bursa naik pangkat dari not for profit menjadi for profit organization, dengan demikian bursa berjangka dengan bebasnya melangkah menjadi perusahaan publik."

merger dan akuisisi.

Demutualisasi bursa pada dasarnya adalah memisahkan secara legal pemilik bursa dari para anggotanya. Menjadikan bursa seperti perseroan terbatas pada umumnya, tanpa harus mengubah karakteristik core business-nya. Dengan pemisahan antara pemilik dan anggota, suatu bursa tidak lagi bisa sepenuhnya mengklaim diri sebagai membership organization.

Seiring dengan itu, predikat sebagai SRO juga menjadi tidak jelas esensinya, karena institusi bursa tidak sesuai lagi dengan komitmen awal pendiriannya yaitu, "oleh, dari dan untuk anggota".

Demutualisasi mengharuskan perombakan dalam tata-kelola maupun pengaturan di bidang penyelenggaraan perdagangan berjangka dan institusi perdagangan berjangka oleh pemerintah dalam hal ini Bappebti (governance). Kalau sebelumnya, keanggotan board didominir oleh unsur anggota, kini harus menempatkan anggota-anggota independen, sebagaimana layaknya sebuah perusahaan publik. Demutualisasi telah membuka jalan tol bagi bursa untuk memobilisasi dana dari masyarakat luas. Demutualisasi membuka jalan bagi bursa untuk menyatukan tidak saja teknologi, tapi juga menyatukan institusi sehingga bisa memanfaatkan dengan optimal efisiensi dari skala ekonomis.

Demutualisasi telah membuka jalan munculnya transnational exchange, yang dengan leluasanya merebut pangsa pasar dunia dalam jasa-jasa keuangan dan memproklamirkan diri sebagai leader. Dari dataran instutional, demutualisasi dapat mendorong merger horizontal antar bursa dengan bursa atau integrasi antara bursa dengan lembaga kliring berjangka, dan yang lebih ekstrim bisa mendorong terjadinya integrasi seluruh otoritas jasa keuangan.

Untuk itulah, konsep demutualisasi bursa berjangka harus jelas aturan pelaksanaannya. Jangan sampai terjadi transactional exchanges di bursa berjangka di tanah air, akibat tekanan bisnis dan tekanan pemilik saham yang hanya mencari keuntungan semata dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga (hedging).

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka demutualisasi bursa berjangka, yaitu;

1. bursa harus lebih mengedepankan sebagai sarana pengelolaan resiko atas ketidakpastian fluktuasi harga di pasar fisik, sarana price referensi dan price discovery serta sarana lindung nilai terhadap fluktuasi harga yang sulit diprediksi.

2. bursa tetap memiliki fungsi membership organization, dengan mengedepankan perlindungan dan fasilitasi bagi anggota bursa dalam melaksanakan transaksi kontrak berjangka di bursa, walaupun orientasinya sudah kearah profit organization.

3. Pendapatan atau laba usaha yang bersumber dari iuran anggota, fee transaksi, dan pendapatan usaha lainnya, digunakan untuk pengembangan usaha bursa ke masa depan. Seperti, kebutuhan belanja operasional bursa dan kebutuhan peningkatan transaksi, pengembangan sistem perdagangan, pengembangan dan pengkajian produk, sosialisasi, dan peningkatan sarana dan prasarana bursa.

4. Pemegang saham bursa seyoginya harus memiliki dasar perdagangan komoditi primer yang kuat dan memiliki kepentingan terhadap perdagangan berjangka komoditi. Sehingga fungsi bursa sebagai sarana pengelolaan risiko (risk managemen), pembentukan harga (price discovery) dan referensi harga (price reference) dan lindung nilai (hedging) dapat terselenggara dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No.32/1997 dan Perubahannya UU No.10/2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.

5. Partisipasi aktif pelaku usaha komoditi dan niat yang kuat untuk melakukan lindung nilai (hedging) untuk bertransaksi di bursa berjangka.

6. Dukungan stekholder dan Asosiasi Komoditi dalam memperkuat bursa berjangka di dalam negeri, sehingga Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) dapat terwujud. ▲

berjangka dan secara sukarela mendirikan bursa untuk kepentingan para anggotanya. Oleh karena itu setiap anggota yang ingin bertransaksi harus membayar uang keanggotaan guna mendapatkan hak akses atau lebih dikenal dengan seats. Para anggota bursa boleh perorangan atau perusahaan yang aktif bertransaksi di pasar berjangka. Secara fisik lantai perdagangan berjangka berada di bursa, setiap komoditi yang ditawarkan dimasukan papan harga (Pit). Setiap kontrak memiliki spesifikasi kontrak dan sistem perdagangannya menggunakan sistem (Open Outcry) belum dilakukan secara elektronik (online system). Pertanyaannya, apakah prinsip klasik tersebut masih relevan untuk saat ini, mengingat kebutuhan akan demutualisasi bursa berjangka sudah tidak bisa ditawarkan lagi dalam rangka mendorong kemajuan bursa berjangka di tanah air.

Transnational corporations

Seperti apakah konsep demutualisasi yang digalang saat ini terutama pasca revisi Undang-Undang No. 32/1997? Tentunya otoritas harus sangat hati-hati dalam menata pengaturan dan implementasi PBK. Jika tidak, akan berbahaya bagi perkembangan industri itu sendiri di masa depan. Karena bursa berjangka akan kehilangan jati dirinya sendiri, mengingat para pemilik saham yang sebelumnya adalah hanya 11 anggota yang tergabung dalam sebuah badan pendiri ditambah anggota lainnya sebagai Pialang dan Pedagang Berjangka.

Dengan adanya demutualisasi bursa, maka pemilik saham akan menjadi lebih luas kepemilikannya, terbuka dan bersifat independen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bursa cenderung bergerak lebih bebas dan bersifat terbuka (public oriented) dalam hal kepemilikan sahamnya.

Di samping itu, orientasi bursa pun akan bergeser. Tidak lagi memikirkan tujuan utama yaitu melayani para anggota dalam rangka meningkatkan transaksi kontrak berjangka komoditi, sarana pembentukan harga (price discovery) dan sarana lindung nilai (hedging), akan tetapi kedudukan bursa lebih ke arah profit organization.

Mengutip Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ito Sumarsono, di media massa, mengatakan, demutualisasi adalah sebuah keniscayaan, akibat pengaruh globalisasi dalam dua dasawarsa terakhir demutualisasi memunculkan tumbuhnya transnational corporations di beberapa bursa berjangka dunia. Dengan pergeseran orientasi itu, bursa tidak lagi memiliki identitas negara asal, memacu pertumbuhan perusahaan ekstra-cepat melalui mekanisme



Wilyana Saudjana

Jadi Agen Perubahan

Wilyana Saudjana, Presiden Direktur PT Overseas Commercial Futures (OCF), dengan jujur mengaku semula tidak punya banyak pengalaman dalam bisnis perdagangan berjangka. Tetapi ketika sudah terjun langsung di bisnis ini, keyakinannya pun memuncak. Sejumlah startegi yang siap diuji pun dipersiapkannya bersama jajaran manajemen OCF.

Empowering Change for Greater Future, inilah slogan yang ditawarkan baik kepada nasabah maupun jajaran OCF.

"Kami berharap OCF bisa membawa perubahan diindustri ini dengan startegi yang telah kami rumuskan. Oleh karena itu kami mengambil slogan tersebut," jelas Wilyana.

Langkah pertama yang kami tempuh untuk menjadi agen perubahan diindustri ini adalah, memilih SDM yang visioner. Selanjutnya diedukasi tentang peraturan perdagangan berjangka dan praktiknya. Dengan demikian, SDM tersebut tidak menjerumuskan perusahaan kepada persoalan yang merugikan nasabah, kata Wilyana lebih jauh.

"Pengamatan saya selama ini, terjadinya persoalan antara perusahaan pialang dengan nasabah lebih disebabkan oknum diperusahaan tersebut. Si oknum itu mengutamakan target transaksi dan komisi besar, sehingga segala cara dilakukan," jelasnya.

Dalam bisnis ini, uang memang adalah segalanya. Tetapi perusahaan pialang pun memiliki kewajiban dalam memajukan industri ini, dengan membangun karakter SDM pialang dan investor yang memiliki visi perdagangan berjangka. "Kalau kita mau jujur, sangat sedikit kontribusi perusahaan pialang bagi perekonomian bangsa ini. Oleh karena itu, OCF mau melakukan perubahan itu. Bursa berjangka bisa maju

jika perusahaan pialang memiliki visi yang jelas dalam menawarkan produk kontrak berjangka," kata ibu dari dua anak ini.

Menurut wanita kelahiran Jakarta, 1972, ini, dia intens menekuni bisnis perdagangan berjangka setelah OCF di take over dari pemilik lama pada awal tahun 2011. Setelah melakukan berbagai perubahan perizinan dari otoritas perdagangan berjangka, September 2011, lalu, OCF mulai beroperasi dari gedung BRI II, lantai 10, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.

OCF semula berdomisili di Surabaya, Jatim. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006 setelah mendapatkan izin perusahaan pialang berjangka dari Bappebti.

"Kami mengambil alih OCF murni di latarbelakangi bisnis. Tidak ada niat lain. Dan kami pun meyakini binis perdagangan berjangka ini di masa depan cukup prospektif," kata alumnus Fak. Marketing, Univ. Philipina, 1996, ini.

"Persaingan bisnis perdagangan berjangka di Ibukota Jakarta sudah cukup ketat. Karena hampir seluruh perusahaan pialang berjangka yang mendapatkan izin dari Bappebti ada di sini. Tetapi kami yakin dengan visi dan misi yang jelas, kami mampu eksis diindustri ini."

Wilyana mengaku, mengenal bisnis perdagangan berjangka setelah pernah menjadi korban penipuan dari perusahaan pialang. Namun, dari peristiwa itu tidak membuat dia kapok menekuni bisnis ini. Malah dia mencari dan menelusuri akar dan inti dari bisnis perdagangan berjangka.

Saya termasuk orang yang nyasar di industri perdagangan berjangka ini, katanya sembari senyum lebar. Latarbelakang saya hanya ibu rumah tangga. Dulu saya sempat memiliki bisnis di bidang butik khusus untuk anak-anak dan remaja dan memiliki beberapa gerai di mal besar Jakarta. Sembari bisnis butik tersebut, saya pernah ditawari dan bertransaksi perdagangan berjangka di salah satu perusahaan pialang. Tetapi naas, saya tertipu, tuturnya.

Dengan kejadian itu, saya mencoba mencari berbagai informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya lihat bisnis ini di luar negeri begitu majunya dan tidak pernah ada masalah praktik penipuan. Karena itu, saya pelajari seluk beluk bisnis ini, dan akhirnya saya pun tertarik menekuni bisnis ini. Tentunya saya juga dibantu oleh beberapa rekan yang juga punya pengalaman dalam mengembangkan perusahaan pialang berjangka.

"Saat ini OCF masih berkonsentrasi menjadi anggota Jakarta Futures Exchange (JFX), dan menawarkan produk-produk yang ada di bursa tersebut. Tetapi kami juga sudah berpikir dan bersiap-siap dalam jangka panjang akan menawarkan kontrak berjangka komoditi primer yang di-transaksikan dengan sistem multilateral," jelasnya.

Tetapi, untuk sampai pada tahap itu, kami perlu melakukan pengkajian dan analisis terhadap kontrak berjangka komoditi primer yang diperdagangkan secara multilateral. Hal itu wajib dilakukan perusahaan, kalau tidak bakal mengalami kesulitan untuk menawarkan kepada investor.

Dari pengamatan saya, mungkin salah, katanya merendah, saat ini ada semacam momok diantara marketing untuk menawarkan kontrak berjangka multilateral. Yaitu minimnya fee transaksi kontrak berjangka multilateral dibandingkan dengan transaksi bilateral. "Oleh karena itu, kami di OCF sedang mengkaji bagaimana fee transaksi multilateral bisa lebih tinggi lagi meski tidak bisa sama dengan fee transaksi bilateral."

Meski telah berpredikat direktris, anak pertama dari tiga bersaudara ini, tetap punya obsesi. Yakni, mendirikan lembaga pendidikan berbasis moralitas. Moralitas suatu generasi terbentuk dengan pendidikan yang benar sejak usia dini. Dengan moralitas yang tinggi, seseorang itu akan lebih respek terhadap sesamanya, tandas Wilyana Saudjana. ▲